

**IMPLEMENTASI HAK INISIATIF ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PERSPEKTIF FIQH SIYASAH  
(Studi di DPRD Kabupaten Pesisir Barat)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Fakultas Syari'ah  
UIN Raden Intan Lampung**

Oleh

**Khoirul Adha  
NPM: 1521020133**

**Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iiyah)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1439H / 2019M**

**IMPLEMENTASI HAK INISIATIF ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PERSPEKTIF FIQH SIYASAH  
(Studi di DPRD Kabupaten Pesisir Barat)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Fakultas Syari'ah  
UIN Raden Intan Lampung**

Oleh

**Khoirul Adha  
NPM: 1521020133**

**Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**



**Pembimbing I : Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum**

**Pembimbing II: Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1439H / 2019M**

## ABSTRAK

Hak inisiatif DPRD adalah hak untuk mengajukan usul rancangan undang-undang atau peraturan daerah, hak inisiatif ini merupakan hak yang dimiliki oleh anggota DPRD untuk melaksanakan fungsinya di bidang legislasi, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Fiqh siyasah* sebagai salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam. Jika dilihat dari syariat Islam nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan daerah tidak lain bertujuan untuk kemaslahatan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimanakah pelaksanaan hak inisiatif anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat (2) Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap hak inisiatif anggota DPRD menurut Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015. Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah : (1) untuk mengetahui pelaksanaan hak inisiatif anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat (2) untuk mengetahui implementasi hak inisiatif anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat menurut *fiqh siyasah*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang memperoleh data dari kegiatan lapangan. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi lapangan dan studi pustaka. Studi lapangan meliputi observasi secara langsung dan wawancara terhadap anggota DPRD di Pesisir Barat. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data yang terkait dengan materi penelitian yang dimaksud adalah al-Quran, Hadist, kitab-kitab Fikih, Jurnal-jurnal dan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Pesisir Barat belum sepenuhnya berjalan secara optimal dikarenakan anggota DPRD masih banyak yang tidak memahami hakikat hak inisiatif itu sendiri (2) pembentukan perda di Kabupaten Pesisir Barat belum signifikan karna DPRD belum memenuhi akuntabilitas dan manfaat yang jelas bagi masyarakat (3) kurangnya komunikasi langsung anggota DPRD dengan masyarakat sehingga anggota DPRD banyak yang tidak mengetahui keluhan maupun peristiwa-peristiwa yang membutuhkan kebijakan dari anggota DPRD itu sendiri sehingga aspirasi masyarakat tidak tersampaikan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : (1) pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Pesisir Barat dapat dikatakan bahwa belum sepenuhnya berjalan secara optimal dikarenakan anggota DPRD masih belum memahami hakikat hak inisiatif itu sendiri (2) pembentukan perda di Kabupaten Pesisir Barat belum signifikan karna anggota DPRD belum memenuhi akuntabilitas dan manfaat yang bagi masyarakat.



## **PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Implementasi Hak Inisiatif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di DPRD Kabupaten Pesisir Barat)**

**Nama : KHOIRUL ADHA**

**NPM : 1521020133**

**Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**

**Fakultas : Syariah**

## **MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum.**

**NIP. 197005022000032001**

**Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.**

**NIP. 197611042005011004**

**Ketua Jurusan**

**Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H**

**NIP. 197111061998032005**





## PENGESAHAN

## Tim Penguji

Penguji II : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H. (.....)

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah

Dr. KH. Muiruddin, M.H.

210221993031002

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ  
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

**“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat”<sup>1</sup>**

**(An-Nisaa :58)**



---

<sup>1</sup> An-Nisaa (58)



## PERSEMBAHAN

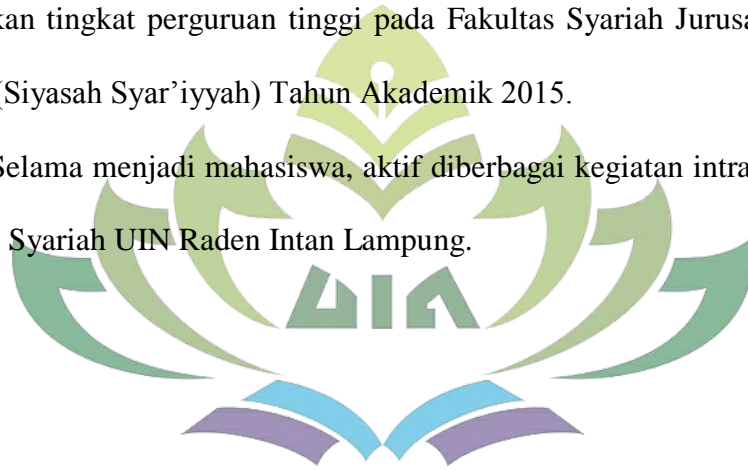
Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Ayah dan Bunda tercinta Yuzidi dan Aniza, yang selama ini sudah mendidik, membimbing dan mendo'akanku disetiap langkah dan mengajarkanku dari sedari kecil hingga beranjak dewasa saat ini, untuk selalu menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Terima kasih Ayah dan Bunda atas semua apa yang telah kalian berikan selama ini, semoga kalian panjang umur sehat selalu, sampai bisa melihat dan bersamaku saat aku sukses nanti.
2. Adik laki-laki dan perempuanku yang bernama Dika Amanda dan Joti Ramona.
3. Keluarga besar sepupu-sepupuan semua nya, yang selalu menasehati untuk kebbaikanku.
4. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## RIWAYAT HIDUP

**Khoirul Adha**, dilahirkan di Walur pada tanggal 10 April 1997, anak pertama dari pasangan Yuzidi dan Aniza. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 01 Walur dan selesai pada tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 02 Pesisir Tengah Krui selesai pada tahun 2012, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 01 Pesisir Barat selesai pada tahun 2015, dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Tahun Akademik 2015.

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung, 12 September 2019  
Yang membuat,

**Khoirul Adha**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah yang tidak terkira dipanjatkan kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Berkat kemuliaan-Nya, penulis akhirnya mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Hak Inisiatif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di DPRD Kabupaten Pesisir Barat)”. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada sauri tauladan kita, Nabi Muhammad S.A.W. Berkat perjuangan, pengorbanan dan keberaniannya kita dapat bernafas dalam atmosfer Islam yang penuh kedamaian.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H). Skripsi ini tidak akan selesai tepat pada waktunya apabila tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi dan perannya baik secara langsung maupun tidak langsung karena itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Moh. Mukri, M, Ag., selaku Rektor UIN Raden intan Lampung.
2. Bapak Dr. Khairuddin Tahmid, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang selalu tanggap kesulitan mahasiswa.
3. Dr. Nurnazli, SH, Sag. M.H., selaku ketua jurusan Siyasah fakultas Syariah.

4. Dr. Erina Pane, S.H. M.Hum selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan dorongan serta motivasi kepada mahasiswa.
5. Dr. Liky Faizal, S.Sos, M.H selaku pembimbing II selalu memberikan semangat positif kepada mahasiswa.
6. Bapak ibu dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik, memberikan waktu dan layanannya dengan tulus dan ikhlas selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
7. Bapak ibu staf karyawan perpustakaan Fakultas Syariah dan Perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung.
8. Keluarga besar KKN 46 Kab. Lampung Selatan, yang menemani selama 40 hari.
9. Keluarga besar siyasah E
10. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan, waktu dan dana yang dimiliki. Akhirnya niat tulus dan ikhlas dan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau penelitian berikutnya untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu siyasah.

Bandar Lampung, 12 September 2019  
Penulis,

**Khoirul Adha**  
**NPM. 1521020133**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>

### **BAB I. PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Fokus Penelitian .....	8
E. Rumusan Masalah .....	8
F. Tujuan Penelitian .....	9
G. Signifikasi Penelitian .....	9
H. Metodologi Penelitian .....	9

### **BAB II. KAJIAN TEORI**

A. Kajian Teori	
1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.	
a. Otonomi Daerah.....	13
b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	18
c. Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .....	31
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Fiqh Siyasah	
a. Pengertian Ahl Al- Hall Wa Al- Aqd.....	33
b. Dasar Hukum Ahl Al- Hall Wa Al- aqd.....	39
c. Kewenangan dan Tugas Ahl Al- Hall Wa Al- Aqd .....	41
B. Tinjauan Pustaka	
1. Penelitian Terdahulu .....	47

### **BAB III. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Objek	
1. Gambaran Umum DPR-D Kabupaten Pesisir Barat .....	49
B. Deskripsi Data Penelitian	
1. Pelaksanaan Hak Inisiatif Anggota DPR-D Kabupaten Pesisir Barat .....	66



#### **BAB IV. ANALISIS PENELITIAN**

- A. Pelaksanaan Hak Inisiatif Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ..... 81
- B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Hak Inisiatif DPRD Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015..... 83

#### **BAB V. PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 88
- B. Rekomendasi ..... 89

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **LAMPIRAN**

- 1. Lampiran 1
- 2. Lampiran 2
- 3. Lampiran 3



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Penegasan Judul**

Skripsi ini berjudul **“Implementasi Hak Inisiatif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di DPRD Kabupaten Pesisir Barat)”**. Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Hak inisiatif adalah hak untuk mengajukan usul Rancangan Undang-Undang atau Peraturan Daerah (Raperda), merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh anggota DPRD untuk melaksanakan fungsinya dibidang legislasi.<sup>1</sup>
2. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia.<sup>2</sup>
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

“Bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan republik indonesia”.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Hak Untuk Menyuarakan Pendapat” (On-line), tersedia di: <http://hakuntukmenyuarakanpendapat.blogspot.com> ( 22 April 2019).

<sup>2</sup>Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” (On-line), tersedia di: <http://id.m.wikipedia.org> (22 April 2019).

<sup>3</sup>Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 153 Ayat (1).

4. *Fiqh siyasah (Siyasah Syar'iyah)* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya, dan negara pada khususnya. Berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam. Guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarinya dari berbagai kemudoratan yang mungkin timbul dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara yang dijalani suatu bangsa.<sup>4</sup>

QS. An-Nurr (49)

وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ

Artinya : *(Jika keputusan itu untuk kemaslahatan mereka, mereka akan datang kepada Rasul dengan patuh.)*

Kesimpulan dari arti ayat di atas ialah adapun jika mereka tahu bahwa keputusan itu dalam suatu kebenaran untuk kemaslahatan mereka, dengan segera mereka mendatangi Rasul dengan patuh dan penuh ketaatan.

Dari uraian di atas penulis menegaskan bahwa hak inisiatif anggota DPRD sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 adalah kewenangan untuk mengajukan usul dalam menciptakan sesuatu peraturan daerah.

---

<sup>4</sup>A. Dijazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Prenada Media, 2000), h. 42.



## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan yang mendorong penulis untuk memilih judul ini sebagai berikut:

### **1. Alasan Objektif**

DPRD merupakan Pemerintah Daerah yang mengatur dan mengurus urusan sendiri Pemerintah Daerah yang mana setiap anggota mempunyai hak inisiatif usul Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, namun pada pengimplementasiannya masih banyak anggota DPRD yang menggunakan hak inisiatif tersebut yang tidak tepat pada sasaran, sehingga dalam pelaksanaannya melahirkan persoalan dan perbedaan pemahaman dari kalangan masyarakat.

### **2. Alasan Subjektif**

- a. Bahasan ini belum pernah dibahas khususnya dalam bentuk skripsi dan penulis merasa mampu dikarenakan bahan dan informasi banyak tersedia dan mudah didapat.
- b. Kajian ini sesuai dengan bidang keilmuan yang penulis tekuni yakni jurusan Siyasa Syar'iyah.

### C. Latar Belakang Masalah

Bentuk negara yang digunakan di Indonesia adalah bentuk negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi.<sup>5</sup> Desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah tersebut.<sup>6</sup>

Penggunaan asas desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ditunjukkan dengan adanya pembagian daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang 1945 amandemen kedua Pasal 18. Pemberian Otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, pemerataan dan peran serta masyarakat.<sup>7</sup>

Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintah pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh legislatif, dan eksekutif saja. Pemberian Otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada kepada pemerintahan negara atau pemerintah nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Oleh karena itu, seluas apapun Otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap di tangan pusat.

---

<sup>5</sup>Josep Riwu Kaho, *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia* (Jakarta: Rineka cipta, 2002), h. 6.

<sup>6</sup>Hanif Nurcholis, *Administrasi Pemerintahan Daerah* (Jakarta Universitas Terbuka, 2011), h. 5.

<sup>7</sup>Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 194 Ayat (1).

Otonomi Daerah, telah diletakkan dasar-dasarnya sejak jauh sebelum terjadinya krisis nasional yang diikuti dengan gelombang reformasi besar-besaran ditanah air. Namun perumusan Otonomi Daerah itu masih bersifat setengah-setengah dan dilakukan tahap demi tahap yang sangat lamban. Setelah terjadinya reformasi yang disertai gelombang tuntutan ketidakpuasan masyarakat diberbagai daerah mengenai pola hubungan antara pusat dan daerah yang tidak adil.

DPRD pada hakikatnya adalah organ pemerintahan ditingkat lokal yang mengemban harapan rakyat untuk berperan sebagai repretasi dan agen perumusan agenda kepentingan rakyat melalui proses perumusan kebijakan publik dan pengawasan terhadap pemerintahan daerah. Pengawasan memiliki arti penting dalam pemerintahan daerah, karena akan memberikan umpan balik untuk perbaikan pengelolaan pembangunan, sehingga tidak keluar dari jalur dan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan dinyatakan; Pemerintah Daerah berhak menetapkan Perda dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan Otonomi dan tugas pembantuan. Dari isi pasal tersebut nampak bahwa atribusi kewenangan pembentukan Perda diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 kepada Pemerintah Daerah.

Dalam menjalankan hak nya anggota DPRD mempunyai hak untuk mengajukan Raperda atas dasar hak inisiatif seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan hal itu DPRD dengan persetujuan Kepala Daerah sesuai dengan tingkatannya, berdasarkan atribusi kewenangan dari Undang-Undang Dasar 1945 berhak



membentuk Perda Provinsi/Kabupaten/Kota. Perda tersebut untuk melaksanakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan serta untuk melaksanakan penugasan dari perintah kepada daerah.

Seperti halnya peraturan perundang-undangan yang lain, Perda terikat pada norma-norma hukum, baik dari sisi paradigma, substansi, maupun prosedur pembuatannya, ikatan norma-norma tersebut menentukan karakteristik dan keberlakuan Perda yang bersangkutan. Oleh karena itu Anggota DPRD dalam menjalankan haknya dalam pembuatan Raperda harus benar-benar memperhatikan validitas dan legitimasi dari Perda tersebut. Berkaitan dengan hak inisiatif anggota DPRD dalam pembentukan Perda, Kabupaten Pesisir Barat merupakan satu dari lima belas (15) Kabupaten/Kota yang letaknya dipinggir laut bagian barat dari perbatasan Tanggamus sampai perbatasan Bengkulu. Kabupaten Pesisir Barat merupakan Kabupaten termuda di provinsi lampung. Kabupaten Pesisir Barat merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat, yang disahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi lampung pada tanggal 25 Oktober 2012 kemudian diresmikan pada tanggal 22 April 2013.<sup>8</sup>

Bersamaan dengan semangat pembangunan yang terkandung di dalam asas Otonomi, maka Kabupaten Pesisir Barat juga membutuhkan Peraturan Daerah yang dapat mengakomodir dan mengikuti kebutuhan daerah dan masyarakatnya.

---

<sup>8</sup>Sejarah Pesisir Barat” (O-line), tersedia di: <http://pesisirbaratkab.go.id> (22 April 2019).

Dalam pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah tersebut, DPRD sebagai pelaksana fungsi legislasi harus benar-benar mengoptimalkan fungsi legislasi yang telah dimandatkan undang-undang. Dalam melahirkan produk legislasi daerah, DPRD harus cermat dan cerdas untuk membentuk peraturan-peraturan daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah Kabupaten Pesisir Barat dan masyarakatnya. Maka penggunaan hak inisiatif yang dilakukan oleh anggota DPRD, merupakan kewajiban moral yang harus dilakukan sebagai pertanggung jawaban mereka terhadap suara yang diberikan oleh konstituen saat pemilihan umum. Namun dengan banyaknya undang-undang atau aturan hukum yang diberi keluasaan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengeksekusi hak inisiatif, malah memberikan celah kepada DPRD untuk bermalas-malasan dalam mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah sehingga menimbulkan banyak persoalan dalam pelaksanaannya.

Masalah mengenai hak inisiatif DPRD dalam pembentukan raperda dalam kajian *Fiqh siyasah* (*siyasah syar'iyah*) tidak terurai secara teoritis, meskipun demikian nilai-nilai yang terkandung dalam Peraturan Daerah tidak lain bertujuan kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Sebagai seorang muslim sudah seharusnya menjadikan Al-Quran sebagai basis pandangan dalam melihat sesuatu.<sup>9</sup>

QS. An-Nuur (49)

وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ

Artinya: "Tetapi jika keputusan itu untuk (kemaslahatan) mereka, mereka akan datang kepada Rasul dengan patuh".<sup>10</sup>

<sup>9</sup>Kajian Fiqh Siyasah" (On-line), tersedia di: <https://m.hidayatullah.com> (22 Juli 2019).

<sup>10</sup>QS. An-Nuur :49

Mengacu pada latar belakang di atas, dalam rangka untuk mengetahui bagaimana fungsi legislasi khususnya pemanfaatan dan pelaksanaan hak inisiatif DPRD dalam melahirkan produk legislasi daerah di Kabupaten Pesisir Barat, maka penelitian ini berjudul **“Implementasi Hak Inisiatif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di DPRD Kabupaten Pesisir Barat)”**

#### **D. Fokus Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka dari itu penelitian ini perlu dibatasi guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan, sehingga peneliti memfokuskan pada **“Implementasi Hak Inisiatif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di DPRD Kabupaten Pesisir Barat)”**.

#### **E. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, penulis mengambil rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan hak inisiatif anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat?
2. Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Hak inisiatif DPRD Kabupaten Pesisir Barat Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015?



## **F. Tujuan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan di atas bertujuan:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hak inisiatif anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat.
2. Untuk mengetahui hak inisiatif anggota DPRD menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dalam pandangan *Fiqh Siyasa*.

## **G. Signifikasi Penelitian.**

1. Memberikan kontribusi akademis terhadap pembangunan ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara (*Siyasa Syar'iyah*) tentang hak inisiatif anggota DPRD menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan *Fiqh Siyasa*.
2. Memberikan kontribusi pemikiran yang dapat menjadi referensi DPRD Kabupaten Pesisir Barat dalam melakukan pengoptimalisasian hak inisiatif anggota DPRD dalam memperjuangkan aspirasi rakyat di daerah.
3. Dapat dijadikan dasar kajian untuk penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam tentang permasalahan terkait.

## **H. Metode Penelitian**

Supaya penelitian ini berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan, maka penulis perlu menentukan cara/metode yang dianggap penulis paling baik untuk digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Reaserch*), yaitu mengadakan penelitian lapangan dengan cara wawancara atau berdialog dengan objek penelitian.<sup>11</sup> dalam hak inisiatif anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersipat deskriptif/analitis, yakni menyajikan data secara terperinci dan melakukan analisis terhadap hak inisiatif yang telah dikeluarkan anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang mungkin berupa manusia, gejala-gejala, benda, pola, sikap, tingkah laku dan sebagainya yang menjadi objek dari suatu penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat yang terdiri dari dua puluh lima (25) anggota DPRD.

#### b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti. Sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*, adalah pengambilan sampel secara sengaja sesuai persyaratan sampel yang diperlukan. *Purposive sampling* juga disebut dengan *judgemental sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan penilaian (*judgment*)

---

<sup>11</sup>Ahmad Anwar, *Prinsip-prinsip Metode Research* (Yogyakarta: Sumbangsih, 1975), h. 2.

penelitian mengenai siapa-siapa saja yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan sampel.<sup>12</sup>

Oleh karenanya, penelitian harus punya latar belakang pengetahuan tertentu mengenai yang dimaksud agar benar-benar bisa mendapatkan sample yang sesuai dengan persyaratan kriteria yang pantas dijadikan sampel. Maka dalam hal ini, penentuan sampel dalam penelitian ini terdiri dari lima anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat, yang terdiri dari ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat dan keempat lainnya sebagai anggota biasa.

#### 4. Sumber Data

Sumber data adalah tempat darimana data itu diperoleh<sup>13</sup>. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

##### a. Data Primer

Data ini diperoleh dari penelitian langsung dilapangan (*field reaserch*), yaitu data informasi atau hasil wawancara yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dalam penelitian, yaitu hasil wawancara dengan anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*), yang berupa ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan, seperti buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, jurnal/makal seminar, tulisan lepas, artikel dan sebagainya.

<sup>12</sup>Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka cipta, 2010.), h. 97.

<sup>13</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka cipta, 1998.), h.144.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah campuran antara metode kepustakaan (*Library Reaserch*) dan metode penelitian lapangan (*Field Reaserch*) yaitu sebagai berikut:

### a. Studi Dokumen

Metode kepustakaan (*Library Reaserch*) yaitu data yang dikumpulkan dengan cara menelaah beberapa literature serta bacaan-bacaan lain dan bahan-bahan hukum yang masih relevan serta berhubungan dengan obyek penelitian, dan penelitian hukum normatif merupakan penelitian terhadap data sekunder.<sup>14</sup>

### b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab penanya dengan responden.<sup>15</sup>

## 6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analitis dengan menguraikan dan menghubungkan data satu sama lain sehingga mendapatkan kesimpulan umum. Hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan induktif yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus.

---

<sup>14</sup>Romi Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 42.

<sup>15</sup>Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 15.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

###### **a. Otonomi Daerah**

Otonomi Daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi<sup>15</sup>. Didalam Otonomi hubungan kewenangan antara Pusat dan Daerah, bertalian dalam pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan untuk menentukan urusan rumah tangga daerah yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas, dan tanggungjawab. Salah satu penjelmaan pembagian tersebut, yaitu daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan baik atas dasar penyerahan atau pengakuan ataupun yang dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah masing-masing.

Otonomi Daerah bukanlah merupakan suatu kebijakan yang baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, kerana sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah dikenal adanya Otonomi Daerah yang tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan inti dari pelaksanaan Otomi Daerah adalah terdapatnya keleluasaan Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan atas dasar kreativitas dan peran serta masyarakat untuk memajukan daerahnya.

---

<sup>15</sup>Ryaas Rasyid, H syaukani, Afan Gaffar, *Otonomi Daerah Dalam Kesatuan (3rd ed)* (Yogyakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), h. 108.



Otonomi Daerah kadang-kadang hanya dipahami sebagai kebijakan yang bersifat institusional belaka yang hanya dikaitkan dengan fungsi-fungsi kekuasaan pemerintahan. Oleh karena itu, yang menjadi perhatian hanyalah soal pengalihan kewenangan pemerintahan dari pemerintahan pusat ke tingkat daerah, namun esensi kebijakan otonomi daerah itu sebenarnya berkaitan pula dengan gelombang demokrasi yang berkembang luas dalam kehidupan nasional bangsa<sup>16</sup>.

Tujuan pemberian Otonomi kepada Daerah setidaknya meliputi empat aspek sebagai berikut: aspek politik, aspek manajemen pemerintahan, aspek kemasyarakatan, dan aspek pembangunan. Aspek politik maksudnya untuk mengikutsertakan, menyalurkan aspirasi dan inspirasi masyarakat dilapisan bawah baik untuk kepentingan daerah maupun untuk kepentingan nasional dalam rangka proses pembangunan demokrasi. Aspek manajemen pemerintahan maksudnya untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, terlebih pada pemberian pelayanan terhadap masyarakat yang salah satu upaya dengan memperluas jenis-jenis pelayanan diberbagai bidangkebutuhan masyarakat.

Aspek kemasyarakatan maksudnya, untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat di daerah sehingga tidak terlalu bergantung pada pemberian pemerintah pusat. Salah satu cara yaitu ditempuh dengan melakukan pemberdayaan. Aspek pembangunan maksudnya, untuk melancarkan program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan keserataan masyarakat.

---

<sup>16</sup>Serundang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), h. 36.

Dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, daerah mempunyai hak-hak untuk mengatur sendiri urusan Pemerintahan Daerah, dengan memilih pemimpin daerah, mengelola aparatur daerah, mengelola kekayaan daerah, mengatur pajak, dan retribusi daerah. Sumber-sumber pendapatan yang terdapat di daerah dan mendapatkan hak-hak lainnya, diatur dalam undang-undang.<sup>17</sup>

Dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah di era seperti sekarang ini, pada prinsipnya berpedoman pada asas-asas umum penyelenggaraan negara, yaitu: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas akuntabilitas, asas efisiensi, dan asas efektivitas.<sup>18</sup>

Negara kesatuan merupakan landasan batas garis dari isi pengertian Otonomi. Berdasarkan landasan batas tersebut dikembangkanlah berbagai peraturan yang mengatur mekanisme yang akan menjalankan keseimbangan antara tuntutan kesatuan dan tuntutan Otonomi.<sup>19</sup> Pada tingkat suprastruktur kenegaraan maupun dalam rangka restrukturisasi manajemen pemerintahan, kebijakan Otonomi Daerah itu dikembangkan seiring dengan agenda dekonsentrasi kewenangan. Jika kebijakan desentralisasi merupakan konsep pembagian kewenangan secara vertikal, maka kebijakan dekonsentrasi pada pokoknya merupakan kebijakan pembagian kewenangan birokrasi pemerintahan horizontal. Keduanya bersipat membatasi kekuasaan dan berperan sangat penting dalam menciptakan iklim kekuasaan yang demokratis atas hukum.

Seperti yang diketahui dengan diperbaharainya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

<sup>17</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 24 ayat (1).

<sup>18</sup>Wiyono, Isworo, *Kewarganegaraan* (Bandung: Rafika Aditama, 2006), h. 22.

<sup>19</sup>*Ibid.*

Pemerintahan Daerah, telah menjadi tonggak baru dalam tradisi pemerintahan di negeri ini, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Pemerintah pusat tidak hanya memberi kewenangan dalam masalah administrasi pemerintahan, tetapi juga desentralisasi kekuasaan dan pembiayaan pemerintah daerah, yang semuanya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Badan Daerah (APBD). Namun pelimpahan kewenangan administratif dan anggaran yang cukup besar ini memunculkan banyak persoalan dikemudian hari. Penyebabnya, penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk korupsi menyebar kedaerah-daerah seiring dengan bergiurnya Otonomi Daerah.<sup>20</sup> Daerah-daerah Otonomi harus siap menanggulangi segala kemungkinan terburuk dari implikasi kebijakan Otonomi tersebut agar dapat berjalan sebaik mungkin, agar rakyat dapat merasakan buah dari Otonomi Daerah yang diharapkan mampu menjalankan fungsinya yang dimanatkan undang-undang dengan sebaik mungkin.

Otonomi Daerah yang merupakan pemberian hak Otonomi kepada daerah, memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan memperhatikan aspek demokratis, keadilan, potensi, dan keanekaragaman daerah.
- b. Pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada Otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab.

---

<sup>20</sup>Sitajudin, *Perlemen Lokal (DPRD) Peran dan Fungsi Dalam Dinamika Otonomi Daerah* (Malang: Setra Press, 2009), h. 56.

- c. Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan utuh diletakkan pada kabupaten dan kota, sedangkan otonomi provinsi merupakan Otonomi yang terbatas.
- d. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus sesuai dengan Konstitusi Negara sehingga tetap terjaga antara hubungan pusat dan daerah.
- e. Pelaksaaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom sehingga tidak ada lagi wilayah administrasi disalam Pemerintah Kabupaten/Kota.
- f. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan fungsi legislatif daerah atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- g. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susuan pemerintahan<sup>21</sup>.

Dengan dikembalikannya kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana fungsinya, DPRD diharapkan dapat lebih kreatif dalam mengelola aspirasi masyarakat yang kemudian dapat diperjuangkan melalui jalur politik optimalisasi fungsi dan peran DPRD ini tentunya perlu direspon oleh partai politik dalam mempersiapkan kader-kader politik agar mampu menyuarakan aspirasi masyarakat dan terwujudnya tujuan utama Otonomi.

Dari uraian di atas menurut penulis Otonomi Daerah adalah kekuasaan, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.

---

<sup>21</sup>Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah* (Yogyakarta: FH UII Press, 2001), h.13-14.

### **b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Sejarah ketatanegaraan dan politik Indonesia menunjukkan terjadinya pasang surut peran DPRD, di satu pihak, serta peran Presiden dan Kepala Daerah, dilain pihak. Praktek ketatanegaraan dan politik Indonesia pernah menempatkan DPR dan DPRD sedemikian kuat dalam praktek penyelenggaraan Negara. Periode ini berlangsung sejak Tahun 1950 hingga pertengahan Tahun 1959. Periode ini betul-betul menunjukkan peran DPR dan DPRD yang luar biasa. Periode ini selesai ditandai oleh dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, DPR dan DPRD benar-benar lumpuh. Peran DPR dan DPRD tidak lebih hanya sebagai tukang stempel. Bahkan lebih jauh demokrasi pun mengalami masa yang cukup suram.

Kalau diperiksa secara teliti tentang risalah perdebatan anggota Dewan Konstituante ketika menanggapi ide yang dilontarkan oleh Presiden Soekarno untuk kembali ke UUD 1945 akan ditemukan sejumlah pandangan yang sangat menarik, terutama pandangan anggota-anggota Dewan Konstituante dari kalangan Masyumi, antara lain, pandangan dari tokoh-tokoh seperti Prawoto Mangkusasmito dan Buya Hamka. Inti pandangan keduanya dalam menanggapi ide Presiden Soekarno untuk kembali ke UUD 1945 adalah Indonesia akan menjadi negara otoriter. Undang-Undang Dasar 1945 ini mengandung sejumlah kelemahan yang bersifat fundamental. Mereka sangat gigih menolak gagasan



itu, tetapi mereka tidak kuasa untuk menghadapi kekuatan politik besar yang ada di depannya.<sup>22</sup>

Tindakan paling dramatis yang menandai betapa kuatnya kekuasaan Presiden Soekarno setelah keluarnya dekrit itu diawali oleh pembubaran DPR hasil Pemilu 1955. Penyebabnya sederhana, DPR menolak melakukan pengesahan Rancangan Anggaran yang diajukan oleh Presiden. Pembubaran ini segera diikuti oleh pembentukan DPR-GR.

Presiden sangat gencar mengampanyekan ide-ide revolusioner dan menggunakan konsep revolusi yang dibuatnya sendiri sebagai instrumen politik untuk menghimpun semua kekuatan politik di dalam kekuasaannya (kooptasi kekuasaan). Siapa pun yang berseberangan dengannya akan mengalami nasib buruk. Partai Masyumi yang ketika itu diperlakukan semena-mena dan dipaksakan untuk membubarkan diri.

Seiring dengan perjalanan waktu, sistem ketatanegaraan dan politik yang dikembangkan Soekarno berakhir dengan sangat tragis pada 1965. Lalu muncullah berbagai ide untuk menyehatkan kembali kehidupan berbangsa dan bernegara. Gagasan negara hukum pun dikumandangkan saat itu. Namun seperti sudah diketahui oleh umum, ide-ide tersebut juga digagalkan secara sistematis. Berikutnya menjelang Sidang Istimewa MPRS pada Tahun 1967 dan Sidang Umum MPRS dilakukan pergantian sejumlah anggota DPR-GR yang tidak sedikit.

---

<sup>22</sup>Bambang Yudoyono, *Perbandingan Sistem Hukum* (Jakarta: Refika Aditama, 2000), h. 95.

Selain mereka yang dianggap tidak bersih, turut pula diberhentikan dari keanggotaan DPR adalah mereka yang aktif mengonsolidasikan gagasan negara hukum. Misalnya, mereka aktif mengusulkan pembentukan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, pembentukan Undang-undang Pemilu, pembentukan Undang-undang Anti Korupsi. Mereka juga sangat kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang sedang menguat saat itu.

Sejak saat itu hingga Tahun 1998, peran DPR dan DPRD tidak lebih hanya sebagai tukang stempel. Bahkan DPRD dirumuskan sebagai bagian dari pemerintah daerah. Hal ini diperparah lagi oleh sistem dan praktek politik yang dikembangkan secara nasional selama pemerintahan Presiden Soeharto, praktek demokrasi yang semu, hak-hak rakyat dikerangkeng selama sekian dekade.

a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasca Amandemen UUD 1945.

Tata negara dan politik merupakan dua hal yang berbeda. Tetapi, keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Hubungan kedua bidang ini bersifat fungsional. Postur ketatanegaraan suatu negara sangat ditentukan oleh postur politik yang dikembangkan oleh partai-partai politik di negara itu. Demikian pula sebaliknya, sistem politik suatu negara juga sangat ditentukan oleh sistem ketata-negaraan yang dibangun di negara tersebut.

Pembentukan hukum akan mengikuti struktur sosial politik dari masing-masing negara. Bagi negara yang menganut konfigurasi politik otoriter, maka pembentukan hukumnya akan memperhatikan ciri yang otoriterian juga. Sedangkan, manakala proses pembentukan hukum (legislasi) tersebut di tempatkan dalam konteks struktur sosial-politik dari negara demokrasi, niscaya

didalamnya akan terjadi kompromi dan konflik-konflik nilai dan kepentingan yang berbeda-beda dalam masyarakat<sup>23</sup>.

Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum diamandemen) memang harus diakui masih mengandung sejumlah kelemahan yang cukup mendasar. Bahkan, kalau ditarik ke belakang, kelemahan Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah diketahui sejak 1950-an. Itulah sebabnya, Dewan Konstituante dibentuk yang bertugas membuat Undang-Undang Dasar baru. Dewan Konstituante, sebenarnya, tidak bisa dikatakan gagal dalam menjalankan tugasnya untuk membuat Undang-Undang Dasar 1945. Lebih tepatnya dikatakan bahwa Dewan Konstituante digagalkan oleh konspirasi kekuatan-kekuatan politik dominan waktu itu. Pembubaran Dewan Konstituante yang ditandai oleh dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sesungguhnya, menandai babak baru hancurnya peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Bahkan, perubahan tersebut menghancurkan seluruh tatanan politik demokratis yang telah terbangun sebelumnya.<sup>24</sup>

Peran DPR dan DPRD: Antara persepsi tata negara dan politik tata negara dan politik merupakan dua hal yang berbeda. Tetapi, keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Fostur suatu negara sangat ditentukan oleh postur politik yang dikembangkan oleh partai-partai politik di negara itu. Demikian pula sebaliknya, sistem politik suatu negara juga sangat

---

<sup>23</sup>Satjipto Raharjo, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan* (Bandung: Alumni, 1980), h. 40.

<sup>24</sup>Yusril Ilham Mahendra, "Revitalisasi Tugas dan Fungsi Dewan Pasca Perubahan UUD 1945 dan Peresmian Rumah Aspirasi Rakyat".(Makalah ini disampaikan pada *Diskusi Panel tentang Revitalisasi Tugas dan Fungsi Dewan Pasca Perubahan UUD 1945*, yang diselenggarakan oleh Universitas Trisakti, Jakarta, 9 November 2000)

ditentukan oleh sistem ketata-negaraan yang dibangun di negara tersebut. Pola-pola relasi antara kedua bidang itu juga sangat ditentukan oleh kebudayaan politik dan hukum yang berkembang. Budaya politik dapat diibaratkan sebagai ruh tata negara. Karena itu, sebaik apa pun pengaturan kekuasaan negara dalam Undang-Undang Dasar maupun undang-undang yang ada di bawahnya tidak akan menolong untuk membuat penyelenggaraan negara menjadi stabil dan baik jika budaya-politiknya tidak cukup mendukung.

Perancis dan Inggris adalah dua negara yang pantas digunakan sebagai contoh tentang soal ini. Perancis memiliki dua belas pemerintahan. Pada saat yang sama, Inggris hanya memiliki dua pemerintahan. Perancis memiliki konstitusi tertulis, bahkan Perancis dikenal sebagai negara yang paling produktif dalam membuat konstitusi. Sebaliknya, Inggris adalah negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis. Menariknya, sistem pemerintahan kedua negara ini sama, yakni parlementer, tetapi sistem politik Inggris lebih stabil.

Disinilah letak urgensinya fondasi budaya politik dalam praktek bernegara. Tetapi, justru di sini pula letak kekeliruannya sehingga pemikiran-pemikiran yang secara substansial bersifat pemikiran politik dianggap pemikiran tata negara. Pemikiran politik hanya berurusan dan berkaitan dengan deskripsi-deskripsi dan fenomena-fenomena sosiologis. Sedangkan, sedangkan pemikiran tata negara bertolak dari norma dan kaidah hukum formal. Sanksi politik tidak dapat dieksekusi, sedangkan sanksi hukum tata negara dapat dieksekusi. Namun, dalam hal ini, sangat diperlukan konstelasi politik tertentu untuk dapat mendukung pelaksanaannya.

Hal yang sangat menarik, jauh sebelum Undang-Undang Dasar 1945 diubah, pemerintah dan DPR telah mengambil langkah cepat dengan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, dan dibuatlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kombinasi antara kelemahan peran DPRD pada masa lalu dan kemauan untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintahan di daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 itu cenderung untuk mengikuti logika sistem pemerintahan parlementer. Hal itu terlihat jelas pada pasal 31 ayat (2) yang selengkapnya berisi ketentuan berikut: Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai Kepala Daerah, Gubernur bertanggung jawab kepada DPRD Provinsi.

Sungguhpun bukan merupakan satu-satunya sebab, rumusan tersebut telah mendorong DPRD berperan sedemikian aktif. Perannya tampak seolah-olah keluar dari konsep desentralisasi, lalu bergeser ke konsep devolusi. Ini terjadi karena hampir tidak ada satupun anggota DPRD yang dimintai pertanggung jawaban hukum oleh aparaturnya, dan tidak sedikit pula yang diajukan ke pengadilan dan divonis sebagai narapidana.

Perubahan konstitusi Indonesia pasca Reformasi, berimplikasi juga bagi daerah Otonom, daerah otonomi berwenang terhadap pengaturan kekuasaan legislasi di Daerah. Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan Otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah bagi Pemerintah Provinsi, Pemerintah



Kabupaten/Kota di Indonesia, menjadi instrumen yuridis operasional untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Dalam konteks Otonomi Daerah, Perda merupakan instrumen pengendali terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah, hal ini disebabkan karena esensi Otonomi Daerah itu adalah kemandirian atau keleluasaan, dan bukan suatu bentuk kebebasan sebuah satuan pemerintah yang merdeka, kemandirian itu sendiri mengandung arti bahwa daerah berhak mengatur dan mengurus urusan rumah tangga pemerintahannya sendiri. Kewenangan mengatur disini mengandung arti bahwa daerah yang bersangkutan berhak membuat produk hukum berupa peraturan perundang-undangan yang antara lain diberi nama Perda.

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam menetapkan Perda beserta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lainnya ini diatur dengan undang-undang. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 41 disebutkan bahwa: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa yang memiliki fungsi legislasi adalah DPRD. Sejalan dengan fungsi legislasi yang dimiliki tersebut, menurut Pasal 42 ayat (1) huruf a, secara institusional DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Di samping itu berdasarkan Pasal 44 ayat (1) huruf a, secara individu anggota DPRD juga mempunyai hak untuk mengajukan rancangan Perda (Raperda). Memperhatikan ketentuan tersebut dapat diketengahkan bahwa pada dasarnya fungsi membentuk Perda (legislasi perda) itu ada pada DPRD<sup>25</sup>. DPRD juga membuat Perda, terutama yang berkenaan dengan peningkatan pendapatan asli daerah. Namun, untuk hal ini, harus diakui bahwa ada hubungan yang sangat jelas dengan ketidak-jelasan konsep Otonomi fiskal yang digariskan oleh Pemerintah Pusat. Akibat yang kemudian muncul ke permukaan adalah daerah seringkali merasa bingung dan ringkih dalam menetapkan bidang- bidang objek pajak yang sah yang sejalan dengan politik fiskal pemerintah pusat.

Kenyataan itu mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, lagi-lagi pemerintah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sehingga ditetapkanlah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. Dilihat dari segi waktu pembuatannya, undang-undang ini dibuat setelah terjadi perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip-prinsip otonomi daerah pun telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun hemat penulis, anggota DPRD tidak perlu cemas karena, sebagaimana telah disebutkan dimuka, postur hubungan dan peran legislatif tidak bergantung semata-mata pada rumusan undang-undang tentang tugas dan wewenangnya<sup>26</sup>, namun esensi dari niat membangun yang menjadi hal

---

<sup>25</sup>Sitajudin, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1997), h. 7.

<sup>26</sup>Sekretariat Negara Republik Indonesia” (On-line), tersedia di: [www.indonesia.go.id](http://www.indonesia.go.id) (9 Juli 2001).

utama dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga rakyat dapat menikmati buah dari Otonomi Daerah itu sendiri.

Satu hal yang ingin ditekankan adalah bahwa anggota DPRD harus mengerti secara benar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti kita ketahui bersama bahwa setiap undang-undang memerlukan tafsir, dan tafsir atas teks-teks hukum itu memiliki kaidah- kaidah dan norma-norma sendiri. Sedikit saja keliru dalam menafsirkan suatu teks, akibat yang terjadi akan sangat fatal.

Menghindari motivasi politik dalam menafsir teks-teks hukum akan lebih baik dan selamat. Anggota DPR/DPRD perlu benar-benar memahami hukum agar dalam menjalankan fungsinya, dalam konteks ini legislasi dapat dijalankan secara baik.

b. Syarat dan Pengertian DPRD.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah suatu lembaga tertinggi negara yang anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil rakyat.<sup>27</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat selanjutnya disebut sebagai DPRD Pesisir Barat adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan ditingkat Kabupaten Pesisir Barat.

Adapun syarat-syarat DPRD seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, bagian kesatu tentang persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menulis syarat-syarat bakal calon anggota adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:

---

<sup>27</sup>Kansil, Cristine, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 83.

Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- (a) Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.
- (b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (c) Bertempat tinggal diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (d) Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia.
- (e) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.
- (f) Setia kepada pancasila, Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- (g) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali. Secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.
- (h) Sehat jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan Narkotika.
- (i) Terdaftar sebagai pemilih.
- (j) Bersedia bekerja penuh waktu
- (k) Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah,

atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

- (l) Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (m) Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari negara.
- (n) Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu.
- (o) Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan dan
- (p) Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

Syarat-syarat calon legislatif tersebut diatas disertai dengan kelegkapan administratif sebagaimana disebutkan dalam pasal 240 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Pasal 173 Ayat (3).



c. Dasar Hukum Yang Mengatur Tentang DPRD.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

d. Tugas, Fungsi dan Wewenang DPRD.

DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota.

a. DPRD mempunyai tugas:

Pengawasan, Legislasi, Perencanaan Anggaran.

b. DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi.

1. Legislasi berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah.
2. Anggaran kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD).
3. Pengawasan kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

Ketiga fungsi sebagaimana dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Kabupaten/Kota<sup>29</sup>. Bagian wewenang dan tugas, Pasal 154 DPRD Kabupaten/Kota mempunyai wewenang dan tugas:

1. Membentuk peraturan daerah Kabupaten/Kota bersama bupati/walikota.
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan perda mengenai APBD Kabupaten/Kota.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan APBD Kabupaten/Kota.

---

<sup>29</sup>*Ibid.* h. 26

4. Memilih bupati/walikota.
5. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian.
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
10. Melaksanakan tugas dan wewenang lain diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>30</sup>

DPRD memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPRD memiliki hak mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, protokoler, serta keuangan dan administratif.

DPRD berhak meminta pejabat negara tingkat daerah, pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Jika permintaan ini tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan panggilan paksa (sesuai

---

<sup>30</sup>*Ibid.* Pasal 154

dengan peraturan perundang-undangan). Jika panggilan paksa ini tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera selama 15 hari (sesuai dengan peraturan perundang-undangan)<sup>31</sup>.

Dari uraian di atas menurut penulis DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah di Provinsi/Kabupaten/kota di Indonesia.

### **c. Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

DPRD sebagai badan legislatif daerah mempunyai kedudukan yang sederajat dan menjadi mitra Pemerintah Daerah, DPRD bukan lagi bagian dari Pemerintah Daerah. Sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, DPRD ditempatkan sebagai bagian dari Pemerintah Daerah.

Setelah adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka DPRD dipisahkan dari Pemerintah Daerah dan dikembalikan kepada fungsi yang seharusnya, yaitu sebagai badan legislatif dengan kedudukan yang sederajat dengan Pemerintah Daerah sebagai badan eksekutif hingga sampai diberlakukannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.

Hubungan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah adalah hubungan kemitraan<sup>32</sup>. Pemisahan secara tegas kedua institusi itu menandai dimulainya sistem Pemerintahan daerah baru yang dipandang lebih demokratis, sehingga DPRD dapat membawa aspirasi masyarakat dan memperjuangkan tuntutan dan

---

<sup>31</sup>*Ibid.* Pasal 336

<sup>32</sup>Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000), h. 7.

kepentingan masyarakat sehingga rakyat sebagai owner akan menempati posisi tertentu.

Keluarnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah tidak merubah kedudukan DPRD, dijelaskan bahwa hubungan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersipat kemitraan. Hal ini terlihat dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah bahwa dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah (Perda) harus melibatkan kedua komponen tersebut. Perda dibentuk oleh pemerintah daerah bertujuan untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri<sup>33</sup>.

Kewenangan DPRD dalam membentuk Perda dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah bersama-sama Gubernur/Bupati/Walikota membentuk Perda. Sehubungan dengan fungsi utama ini kepada DPRD diberi hak antara lain mengajukan Rancangan Perda dan hak mengadakan perubahan atas Rancangan Perda (Pasal 101 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015) ketentuan ini diperkuat ayat (1) yang diatur dalam tata tertib DPRD<sup>34</sup>. Dalam hal ini DPRD atas inisiatif sendiri dapat menyusun dan mengajukan Rancangan Perda.

---

<sup>33</sup>Supardan Modoeng, *Teori dan Praktik Penyusunan Perundang-undangan Tingkat Daerah* (Jakarta: PT. Tinta Mas Indonesia, 2001), h. 46.

<sup>34</sup>Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 101 Ayat (1).

Hak untuk mengusulkan Rancangan Perda inisiatif pada dasarnya bertujuan untuk memperjelas amanat undang-undang atau aturan yang lebih tinggi di atasnya agar dapat membantu Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam proses pembangunan di daerah.

Dari uraian di atas menurut penulis Hak inisiatif anggota DPRD adalah dalam kamus besar hak adalah kewenangan, milik atau sesuatu yang benar, sedangkan inisiatif adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Jadi hak inisiatif anggota DPRD adalah kewenangan untuk mengajukan usul/inisiatif dalam menciptakan suatu Peraturan Daerah.

## **2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Fiqh Siyasa**

### **a. Pengertian *Ahl Al- Hall- Wa Al- Aqd***

Istilah *Ahl Al- Hall Wa Al- Aqd* berasal dari tiga suku kata, yaitu *ahlun*, *hallun* dan *aqdun*. Kata *أهل* berarti ahli atau famili atau keluarga, sedangkan kata *أحل* berarti membuka atau menguraikan, sementara kata *أقده* memiliki arti perjanjian. Dari ketiga suku kata tersebut dapat dirangkai menjadi sebuah kata (istilah) yang mempunyai arti "orang-orang yang mempunyai wewenang melonggarkan dan mengikat"<sup>35</sup>.

Bibit konsep *Ahl Al- Hall Wa- Aqd* pertama kali muncul dalam masa Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab, sebelum kewafatannya menunjuk enam orang sahabat yang menjadi tim formatur untuk memilih Khalifah setelah beliau, yakni Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Saad bin Abi Waqash, Abdu al- Rahman bin Auf, Zubair bin Al- Awwam, dan Thalhah bin

---

<sup>35</sup>Suyuthi J Pulungan, *Fiqh Siyasa: Ajaran dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 66.

Ubaidillah serta Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar hanya bertindak sebagai penasihat, dan tidak berfungsi sebagai calon<sup>36</sup>.

Istilah *Ahl Al- Hall Wa Al- Aqd* dirumuskan oleh ulama *fiqh* untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Paradigma pemikiran ulama *fiqh* mengenai didasarkan pada *Ahl Al- Hall Wa Al- Aqd* sistem pemilihan empat khalifah pertama yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua golongan, Ansar dan Muhajirin. Mereka ini oleh ulama *fiqh* diklaim sebagai *Ahl Al- Hall Wa Al- Aqd* yang bertindak sebagai wakil umat.

Walaupun pemilihan Abu Bakar dan Ali dilakukan secara spontan atas dasar tanggung jawab terhadap kelangsungan keutuhan umat dan agama. Namun kedua tokoh tersebut mendapat pengakuan dari umat, *Ahl Al- Hall Wa Al- Aqd* adalah orang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka.

Mereka menyetujui pendapat wakil-wakil itu karena ikhlas, konsekuen, takwa dan adil, dan kecermelangan pikiran serta kegigihan mereka di dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.<sup>37</sup>

Seperti pendapat Rasyid Ridha yang dikutip Suyuthi, *ulil amri* adalah *Ahl Al- Hall Wa Al- Aqd*. Ia menyatakan: “Kumpulan *ulil amri* dan mereka yang disebut *Ahl Al- Hall Wa Al- Aqd* adalah mereka yang mendapat kepercayaan dari umat yang terdiri dari para ulama, para pemimpin militer, para pemimpin pekerja untuk kemaslahatan publik seperti pedagang, tukang, petani, para pemimpin

<sup>36</sup>Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 28.

<sup>37</sup>Suyuti J Pulungan, *Fiqh Siyasah Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 66-67.



perusahaan, para pemimpin partai politik dan para tokoh wartawan. Al-Razi juga menyamakan pengertian antara *Ahl Al- Hall Wa Al- Aqd* dengan *ulil amri*, yaitu para pemimpin dan penguasa. Demikian juga *Al-Maraghi* yang sependapat dengan apa yang diungkapkan Rasyid Ridha.<sup>38</sup>

Menurut Muhammad Abduh *ulil amri* adalah *Ahl Al- Hall Wa Al- Aqd* yaitu kumpulan orang-orang profesional dalam bermacam keahlian ditengah masyarakat, mereka adalah orang-orang yang mempunyai kapabilitas yang telah teruji. Mereka adalah para amir, hakim, ulama, pemimpin militer dan semua pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat islam dalam berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan publik.<sup>39</sup>

Dengan demikian, *Ahl Al- Hall Wa Al- Aqd* dapat didefinisikan sebagai sebuah lembaga yang berisi tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang yang diberi kewenangan untuk memilih seorang khalifah atau pemimpin bagi umat Islam. Lembaga ini juga berhak membuat ketentuan mengenai syarat seseorang yang boleh dipilih sebagai khalifah atau pemimpin. Dalam terminologi politik *Ahl Al- Hall Wa Al- Aqd* adalah dewan perwakilan rakyat (lembaga legislatif) sebagai representasi dari seluruh masyarakat (rakyat) yang akan memilih kepala negara serta menampung dan melaksanakan aspirasi rakyat.

Dari mulai masa pemerintahan khalifah Abu Bakar, semua masalah yang berhubungan dengan negara dan kemaslahatan umat apabila ia tidak menemukan penyelesaiannya di dalam Al-Quran dan hadist maka permasalahan tersebut diselesaikan dengan cara musyawarah. Jika mereka semua sepakat atas satu

---

<sup>38</sup>*Ibid.*

<sup>39</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1997), h. 138.

keputusan, maka dia pun memutuskan permasalahan tersebut sesuai musyawarah tadi. Begitu pula pada masa Umar bin al-Khattab, dia mempunyai orang-orang khusus dari pada *ulil amri* yang disebut sebagai *Ahl al-Hall wa al-Aqd* untuk melaksanakan musyawarah guna menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan negara dan kemaslahatan umat<sup>40</sup>.

Intuisi musyawarah diwujudkan oleh khalifah Umar bin al-Khattab menjadi majelis atau lembaga tertinggi sebagai lembaga pemegang kekuasaan legislatif dalam pemerintahannya. Setiap keputusan dan peraturan yang dibuat pada masa pemerintahannya diproses melalui musyawarah. Pada masa pemerintahannya dibentuk dua badan penasehat atau *syura*. Badan penasehat yang satu merupakan sidang umum, yang diundang bersidang bila negara menghadapi bahaya. Sedangkan yang lainnya adalah badan khusus yang membicarakan masalah rutin dan penting. Bahkan masalah pengangkatan dan pemecatan pegawai sipil serta lainnya dibawa ke badan khusus ini dan keputusannya dipatuhi<sup>41</sup>.

Khalifah Umar mempunyai satu cara musyawarah yang belum pernah dilakukan sebelumnya, yaitu terkadang apabila ia menghadapi suatu masalah pertama ia bawa ke sidang musyawarah umum yang dihadiri oleh kaum muslimin untuk mendengarkan pendapat mereka. Kedua masalah yang sama ia bawa ke sidang khusus yang dihadiri oleh para sahabat nabi yang senior dan sahabat-sahabat cendekiawan untuk mendengarkan pendapat mereka yang terbaik.

---

<sup>40</sup>Farid Abdul Kholiq, *Fiqh Politik Islam* (Jakarta: Amzah, 2005), h. 78-79.

<sup>41</sup>*Ibid.* h. 23

Umar juga pernah mengizinkan penduduk untuk bermusyawarah dalam memilih calon yang pantas dan jujur menurut mereka. Hal ini terjadi ketika ia hendak mengangkat pejabat pajak untuk Kufah, Basrah dan Syria<sup>42</sup>. Setelah Umar wafat, lembaga Syura yang dibentuk oleh Umar segera melakukan rapat untuk menentukan pengganti Umar sesuai dengan amanah Umar bin Khattab.

Paradigma pemikiran ulama fikih merumuskan istilah *Ahl Al- Hall Wa Al- Aqd* didasarkan pada sistem pemilihan empat khalifah pertama yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua golongan, Ansar dan Muhajirin. Mereka ini oleh ulama *fiqh* diklaim sebagai *Ahl Al- Hall Wa Al- Aqd* yang bertindak sebagai wakil umat. Walaupun pemilihan Abu Bakar dan Ali dilakukan secara spontan atas dasar tanggung jawab terhadap kelangsungan keutuhan umat dan agama. Namun kedua tokoh tersebut mendapat pengakuan dari umat.

Dengan demikian, *Ahl Al- Hall Wa Al- Aqd* terdiri dari berbagai kelompok sosial yang memiliki profesi dan keahlian yang berbeda, baik dari birokrat pemerintahan maupun tidak yang lazim disebut pemimpin formal dan pemimpin informal. Tidak semua pemimpin dan pemuka profesi dan keahlian yang disebut otomatis adalah anggota dari *Ahl Al- Hall Wa Al- Aqd*, sebab anggota lembaga ini harus memenuhi kualifikasi.

Al-Mawardi dan Rasyid Ridha merumuskan beberapa syarat, yaitu berlaku adil dalam setiap sikap dan tindakan, berilmu pengetahuan, dan memiliki wawasan dan kearifan<sup>43</sup>. Dengan kualifikasi ini diharapkan golongan *Ahl Al- Hall Wa Al- Aqd* dapat menentukan siapa diantara ahl al-imamat yang pantas menjadi

---

<sup>42</sup>Suyuthi J Pulungan, *Fiqh Siyasah Pemikiran* (Jakarta: Persada, 2000), h. 124-125.

<sup>43</sup>Suyuthi J Pulungan, *Fiqh Siyasah Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), h. 69-70

kepala negara menurut syarat-syarat yang ditentukan, dan mampu memegang jabatan itu untuk mengelola urusan negara dan rakyat.

Begitu pula pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, dia mempunyai orang-orang khusus dari pada ulil amri yang disebut sebagai *Ahl Al- Hall Wa Al- Aqd* untuk melaksanakan musyawarah guna menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan negara dan kemaslahatan umat<sup>44</sup>. Secara realita, masalah kelompok *Ahl Al- Hall Wa Al- Aqd* dan pemilu adalah seperti masalah “kekhalifahan” sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun yakni termasuk kemaslahatan umat yang semua pengaturannya diserahkan kepada rakyat.

Hal ini tidak termasuk masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah dan keyakinan. Dalam bukunya Farid Abdul Khaliq memastikan bahwa kelompok *Ahl Al- Hall Wa Al- Aqd* yang sering dipakai dalam istilah turats *fiqh* sejak awal Islam adalah mereka “Dewan Perwakilan Rakyat” atau yang biasa disebut Ahlul Ikhtiyar, yang para khalifah selalu merujuk kepada mereka dalam perkara-perkara rakyat juga berkomitmen dengan pendapat mereka, dan mereka mempunyai hak untuk memilih atau menobatkan khalifah juga memberhentikannya. *Ahl Al- Hall Wa Al- Aqd* terdiri dari para ulama, para pemimpin suku dan pemuka masyarakat yang menguatkan mereka sebagai lembaga legislatif.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup>Farid Abdul Kholiq, *Fiqh Politik* (Jakarta: Raja Persada, 2005), h. 78-79.

<sup>45</sup>Taufik Abdullah, *Tematis Dunia Islam* (Jakarta: Ensiklopedia, 2005), h. 277.

### b. Dasar Hukum *Ahl Al- Hall Wa Al- Aqd*.

Bila dalam al-qur'an dan sunah sebagai dua sumber perundang-undangan Islam tidak menyebutkan *Ahl Al- Hall Wa Al- Aqd* atau Dewan Perwakilan Rakyat namun sebutan itu hanya ada di dalam turats fikih kita di bidang politik keagamaan dan pengambilan hukum substantial dari dasar-dasar menyeluruh<sup>46</sup>, maka dasar sebutan ini di dalam mereka yang di sebut dangan “*ulil amri*” dalam firman allah SWT: taatilah allah dan taatilah rosul(Nya),dan ulil amri di antara kamu Seperti yang di jelaskan di bawah:


  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*(QS.an-nisa” (4): 59)<sup>47</sup>.”

Juga dalam firman-Nya dan kalau mereka menyerahkannya kepada rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenaran nya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka rasul dan ulil amri.

<sup>46</sup>Farid Abdullah Kalid, *Politik Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1998), h. 83.

<sup>47</sup>Qur'an Surat, An-Nisa' (4):59.

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ  
وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ  
وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

Artinya: Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri. di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri. Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut Syaitan, kecuali sebagian kecil saja (diantaramu). (QS. an-nisa" (4): 83<sup>48</sup>.

Dasar sebutan ini juga ada dalam mereka yang disebut dengan umat dalam firman-nya: dan hendaklah ada diantara kamu segolongan rakyat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; mereka adalah orang-orang yang beruntung.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ  
الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (QS. Al-imran (3):104<sup>49</sup>.

Dengan demikian, *fiqh* politik Islam telah menciptakan suatu bentuk musyawarah dimasa awal timbulnya Daulah Islamiah di madinah, Nabi Muhammad SAW, sebagai mana ia juga telah menciptakan satu bentuk konstitusi yang dikenal dengan konstitusi madinah.

<sup>48</sup>Qur'an Surat An-Nisa' (4):83.

<sup>49</sup>Qur'an Surat Al-Imran (3):104.



Dengan demikian, ia juga telah menciptakan satu prinsip “sesuai undang – undang” dalam komunikasi politik, salah satu prinsip terpenting yang ditetapkan oleh Islam dibidang konstitusional politik, yang belakangan ini di kenal dengan ilmu politik barat dan membuat beberapa gambaran penetapan nya.

Ilmu politik barat telah mendahului kita sampai kepada suatu yang seharusnya kitalah yang lebih dahulu sampai kepadanya, daripada beragam sistem kehidupan, umumnya sistem politik, khususnya-seandainya kita tidak tertimpa kelemahan dan keterbelakangan disegala bidang kehidupan<sup>50</sup>.

Bentuk musyawarah itu tidak lain kecuali apa yang dikenal dengan *Ahl Al-Hall Wa Al- Aqd* atau Dewan Perwakilan Rakyat ahlul ikhtiar di kenal Islam, yang mereka telah dipercaya oleh rakyat dengan keilmuan kecendikiawan mereka serta keiklasan mereka. Juga dengan kesederhanaan mereka dalam membuat hukum hukum yang diperlukan.

### **c. Kewenangan *Ahl Al- Hall Wa Al- Aqd*.**

Dasar dalam masalah ini adalah bahwa rakyat yang mewakili kekuasaan dalam memilih pemimpin, sementara *Ahl Al- Hall Wa Al- Aqd* mewakili mereka, kecil jumlahnya dari rakyat, tetapi memiliki kapasitas untuk memikul tanggung jawab memilih pemimpin. Sebagai mana yang dipaparkan almawardi apa bila *Ahl Al- Hall Wa Al- Aqd* berkumpul untuk memilih, mereka meneliti keadaan orang-orang yang berhak menjadi pemimpin yang sudah masuk kriteria, lalu mereka mengajukan orang yang terbaik dan paling sempurna kriterianya untuk disumpah. Mengajak rakyat untuk taat kepadanya dan tidak menahan diri dari pembalatnya.

---

<sup>50</sup>Farid Abdul Kalid, *Fiqh Politik Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1997), h. 82.

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf bahwa tugas *Ahl Al- Hall Wa Al- Aqd* adalah sebagai berikut:

- 1) Tugas *Ahl Al- Hall Wa Al- Aqd* adalah mencalonkan dan memilih serta melantik calon khalifah dan memberikat bai'at in'iqad kepada khalifah. Imam Al-Mawardi berkata jika *Ahl Al- Hall Wa Al- Aqd* telah berkumpul untuk memilih maka mereka memeriksa orang yang mencalonkan. Mereka harus mendahulukan yang banyak kelebihan-nya, yang paling sempurna persyaratan-nya, dan paling segera ditaati rakyat, tanpa bergantung pada pembai'atannya.
- 2) *Ahl-Al-Hall Wa-Aqd* melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Disinilah perlu Al-Sulthah Al-Tasyriah tersebut diisi oleh para mujtahid dan para ahli fatwa, mereka berusaha mencari ilat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dalam dan menyesuaikannya dengan ketentuan yang terdapat di dalam nash. Disamping itu, ijtihad anggota legislatif atau *Ahl Al- Hall Wa Al- Aqd* harus mengacu pada prinsip *jalb al-mashalih dandaf al-malfasid* (mengambil maslahat dan menolak kemudharatan) ijtihad mereka perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil perturan yang akan di undangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka<sup>51</sup>.

---

<sup>51</sup>Abd al- Wahhab Khallaf, *al-Siyasah al-Syar'iyah aw Nizham al-Dawlah al-Islamiah fi Syu'un al-Dusturiah wa al-Kharijiyyah wa al-Maliyyah* (al-Qahirah: Mathaba'ah al-Taqqaddum, 1397H/1997M), h. 59.

Menurut Khalid ali Muhammad al-Anbari, ulil amri termasuk dalamnya *Ahl Al- Hall Wa Al- Aqd* memiliki enam macam tugas sebagai berikut:

- 1) Tugas di bidang keagamaan, yang meliputi:
  - a) Mengembangkan ilmu-ilmu agama.
  - b) Menghormati ahli-ahli ilmu agama.
  - c) Meminta pandangan para ahli agama dalam soal hukum dalam menyangku keagamaan.
  - d) Memberantas bid'ah dan mengambil tindakan undang-undang sesuai hukum yang berlaku terhadap orang yang mengamalkannya untuk memelihara agama dari pada kecacatan dan melindungi umat Islam dari kesesatan.
  - e) Mendukung tegaknya syariat-syariat Islam, misalnya memberikan dukungan untuk dikumandangkannya adzan dan iqomad di berbagai masjid dan mushola sebagai menandakan telah masuknya shalat lima waktu.
  - f) Menjadi imam shalat.
  - g) Menyampaikan khotbah.
  - h) Menentukan pemulaan akhir dan akhir pelaksanaan ibadah puasa.
  - i) Menyediakan kemudahan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
- 2) Tugas di bidang pertahanan, yang meliputi tugas-tugas sebagai berikut:
  - a) Berijtihad menentang kaum musyrikin yang memusuhi Islam.
  - b) Memerangi pemberontakan dan membentuk angkatan bersenjata yang yangmemadai, sehingga para tentara yang bergabung

dalam angkatan bersenjata itu dapat hidup layak dengan gaji yang di terima nya.

- 3) Tugas di bidang kehakiman, yang meliputi tugas tugas sebagai berikut:
  - a) Menegakan keadilan dan menumpas kedzaliman.
  - b) Melaksanakan hudud (hukum) syariah agar segala larangan Allah tidak di perolok-olok dan hak-hak manusia tidak di langgar.
  - c) Memisahkan kekuasaan eksekutif dari pada kekuasaan yudikatif dengan melantik dan hakim yang mampu mengemban tugas agar mencegah tidak terjadinya pertikaian dan kedzaliman sehingga semua pihak, baik pihak yang kuat maupun pihak yang lemah, ataupun pihak yang hina maupun pihak yang mulia memiliki kedudukan setara di mata hukum.
- 4) Tugas di bidang keuangan, yang meliputi tugas-tugas sebagai berikut.
  - a) Memungut dan mendistribusikan zakat, jizyah, fai, dan kharaj.
  - b) Memberi perhatian kepada harta-harta yang di wakafkan untuk tujuan kebajikan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.
- 5) Tugas di bidang pemerintahan negara, yang meliputi tugas-tugas sebagai berikut:
  - a) Memiilih mereka yang berklayakan untuk melakukan tugas-tugas yang ada kaitannya dengan kaum muslimin dan orang banyak. Sehingga tugas yang di percayakan kepadanya dapat dilakukan dengan baik.

- b) Mengawasi pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan urusan umat, sehingga dapat segera diketahui jika ada pihak-pihak tertentu melakukan penghianatan atau penipuan.

Hampir senada dengan pendapat al-Anbari, al-Mawardi menyatakan tugas ulil amri yang termasuk dalamnya *Ahl Al- Hall Wa Al- Aqd* sepuluh macam yaitu:

- a. Mempertahankan dan memelihara agama.
- b. Menegakan hukum-hukum dan keadilan pada pihak-pihak yang berperkara.
- c. Melindungi wilayah Islam dan memelihara kehormatan rakyat agar mereka bebas dan aman, baik jiwa maupun hartanya.
- d. Memelihara hak-hak rakyat dan hukum-hukum tuhan.
- e. Membentuk kekuatan untuk menghadapi musuh.
- f. Melaksanakan jihad untuk menghadapi pihak-pihak yang menghadap.
- g. Memungut zakat, dan mendistribusikannya kepada yang membutuhkan.
- h. Mengatur penggunaan harta bayt al-mal (kas negara) secara efektif.
- i. Melantik orang yang jujur dan berkualitas guna mengurus dan menjaga keuangan negara.
- j. Memantau pekerjaan dalam rangka membangun negara dan menjaga agama.

Berdasarkan pandangan-pandangan para pakar hukum tata negara dalam Islam tersebut di atas dapat penulis tegaskan bahwa tugas pokok *Ahl Al- Hall Wa Al- Aqd* adalah mencalonkan dan memilih Khalifah serta mengawasi segala

kebijakan sesuai dengan syari'at Islam, mensejahterakan rakyat dan menjalankan kebijakan pemerintah sesuai dengan syariat Islam.

Kewenangan kelembagaan negara legislatif yang dalam hal ini *Ahl Al-Hall Wa Al- Aqd*:

- a. Memberikan masukan dan nasihat kepada khalifah dan tempat konsultasi dalam menentukan kebijakannya.

Kewenangan di bidang perundang-undangan yang meliputi:

- a. Menegakan aturan yang ditentukan secara tegas dalam syariat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang mengikat kepada seluruh umat tentang hal-hal tidak diatur secara tegas oleh al-qur'an dan hadist.
- b. Memutuskan salah satu penafsiran peraturan syariat yang berpenafsiran ganda, sehingga tidak membingungkan umat.
- c. Memilih dan mebai'at khalifah. *Ahl Al- Hall Wa Al- Aqd* berwenang memilih dan mebai'at khalifah yang tugasnya meminta pertanggung jawaban khalifah.
- d. Menjalankan fungsi pengawasan dalam kebijakan pemerintah. *Ahl Al-Hall Wa Al- Aqd* mempunyai wewenang untuk mengontrol khalifah, atas seluruh tindakan yang terjadi secara riil dalam negara<sup>52</sup>.

Tugas dan wewenang *Ahl Al- Hall Wa Al- Aqd* sebagaimana diuraikan di atas jika dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, niscaya akan selalu terpelihara hubungan baik vertikal dengan tuhan dan hubungan horizontal dengan sesama

---

<sup>52</sup>Frengki, *Sistem Politik dan Ketatanegaraan Islam* (Satuan Acara Perkuliahan syariah UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 22 April 2019).



manusia. Terpelihara dengan baik kedua macam hubungan ini merupakan karakteristik pemerintahan dalam Islam yang beriman dan bertakwa serta bertanggung jawab kepada Allah SWT dan kepada rakyat yang berada di bawah kekuasaannya. Pada dasarnya semua mengajak dan menyeru kepada nilai-nilai persamaan (*equality*) dan keadilan (*justice*).<sup>53</sup>

## B. Tinjauan Pustaka

### 1. Penelitian Terdahulu

Terkait penelitian yang dilakukan sebelumnya yang dilakukan oleh: Zahrial Husein yang berjudul *“Dampak Studi Banding Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Kualitas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat”*, Iyaji Qolbinur yang berjudul *“Analisis Kebijakan Pelestarian Repong Damar”*, Anjelina yang berjudul *“Implementasi Kebijakan Pengembangan Pantai Tanjung Setia”*, Nanda Pratama Sukoco yang berjudul *“Peran Badan Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur”*, Rahma Aulia, Fifiana Wisnaeni yang berjudul *“Kajian Yuridis Terhadap Fungsi Legislasi DPRD”*.

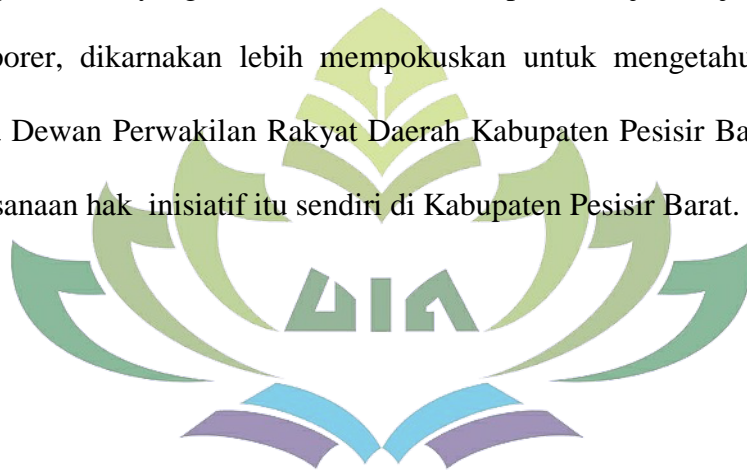
Tabel 1. Tinajuan Pustaka

No	Peneliti	Judul
1	Zahrial Husein	Dampak Studi Banding Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Kualitas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
2	Iyaji Qolbinur (2012)	Analisis Kebijakan Pelestarian Repong Damar Kabupaten Pesisir Barat.

<sup>53</sup>Ahmad Sudirman Abbas, “Perspektif Hukum Islam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Al-Adalah, Vol 11, No 1 2013, h. 1 (On-line), Tersedia di <https://doi.org/10.24042/adalah.v11i1.288> (11 September 2019 pukul 01:36 WIB).

3	Anjelina (2013)	Implementasi Kebijakan Pengembangan Pantai Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat.
4	Nanda Pratama Sukoco (2012)	Peran Badan Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur
5	Rahma Aulia, Fifiانا Wisnaeni.	Kajian Yuridis Terhadap Fungsi Legislasi Daerah.

Berdasarkan kajian literatur terdahulu diatas, maka dapat digambarkan bahwa penelitian yang akan dilakukan merupakan kajian-kajian yang sangat kontemporer, dikarenakan lebih memfokuskan untuk mengetahui Hak Inisiatif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat dan terlebih kepelaksanaan hak inisiatif itu sendiri di Kabupaten Pesisir Barat.



### **BAB III**

#### **DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Gambaran Umum Objek**

###### **1. Sejarah Kabupaten Pesisir Barat.**

Kabupaten Pesisir Barat merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat sebagai Kabupaten Induk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor: 5364).

Pada dasarnya pembentukan Kabupaten Pesisir Barat bertujuan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Hal ini memperhatikan aspirasi masyarakat Pesisir Barat yang dituangkan dalam beberapa surat regulasi antara lain:

- a. Surat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Barat Nomor : 05/DPRD-LB/Kep.D/2006 tanggal 20 Maret 2006 tentang Persetujuan Terhadap Rencana Pemekaran Kabupaten Lampung Barat.
- b. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor : 14/DPRD-LB/Kep.D/2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang Persetujuan terhadap Kesanggupan Dukungan Dana Pemilihan Kepala Daerah Pertama Kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat hasil pemekaran Kabupaten Lampung Barat.

- c. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat  
Nomor : 15/DPRD-LB/Kep,D/2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang  
Persetujuan terhadap Penetapan Calon Lokasi Ibukota Kabupaten Pesisir  
Barat;
- d. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/197/KPTS/01/2010, tanggal  
24 Juni 2010 tentang Kesanggupan Dana Kepada Pemerintah Kabupaten  
Pesisir Barat Hasil Pemekaran Kabupaten Lampung Barat;
- e. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/198/ KPTS/01/2010 tanggal  
24 Juni 2010 tentang Kesanggupan Dukungan Dana Pemilihan Kepala  
Daerah Pertama kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat hasil  
Pemekaran Kabupaten Lampung Barat;
- f. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/199/KPTS/01/2010 tanggal,  
24 Juni 2010 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat;
- g. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/197/BaKPTS/01/2010  
tanggal 24 Juni 2010 tentang Kesanggupan Dukungan Dana Kepada hasil  
Pemekaran Kabupaten Lampung Barat;
- h. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor :  
29 Tahun 2007 tanggal Persetujuan Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat;
- i. Keputusan Pimpinan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung  
Nomor : G/117/B.II/HK/2008 tanggal 25 Maret 2008 tentang persetujuan  
pembentukan dan pemberian Dana Bantuan Penyelenggaraan  
Pemerintahan Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Pesisir Barat;

- j. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/559/B.II/HK/2008 tanggal 26 September 2008 tentang persetujuan Bantuan Dana dan Pemindahan personil Kepada Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Pesisir Barat dan;
- k. Keputusan Gubernur Lampung Nomor ; G/559/B.II/HK/2008 tanggal 30 Desember 2010 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung.

Bagi Daerah Otonom Baru mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat pasal 13 ayat (1) menyatakan pejabat Kepala Daerah Otonom baru menyusun dan menyampaikan Laporan Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi Pejabat Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi Pejabat Bupati/Walikota sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

Mengacu pada norma di atas maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Triwulan III Tahun 2015, dimana laporan ini merupakan laporan tahap kedelapan semenjak diresmikannya Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat pada tanggal 22 April tahun 2013.

## 2. Letak Geografis Kabupaten Pesisir Barat.

Kabupaten Pesisir Barat juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi pusat kawasan ekonomi kreatif berbasis alam di Provinsi Lampung, dengan lini sektor di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan dan pariwisata. Letak Kabupaten Pesisir Barat yang cukup strategis, berbatasan langsung dengan 2 (dua) Provinsi dan 1 (dua) Kabupaten, adapun data selengkapnya sebagai berikut yaitu:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ujung Rembun, Desa Pancur Mas, Desa Sukabanjar Kecamatan Lumbok Seminung, Desa Kubu Perahu Kecamatan Balik Bukit, Desa Kutabesi, Desa Sukabumi Kecamatan Batu Brak, Desa Sukamarga, Desa Ringinsari, Desa Sumber Agung, Desa Tugu Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat, Desa Gunung Doh Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Desa Ngarit, Desa Rejosari, Desa Petekayu, Desa Simagalih Kecamatan Ulu Belu, Desa Datar Lebuay Kecamatan Naningan Kabupaten Tanggamus, Desa Way Beluah, dan Desa Melaya Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tampang Tua Kecamatan Pematang Sawa, Desa Sedayu, Desa Sidomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus;
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; dan
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.



Secara Topografi Kabupaten Pesisir Barat dibagi menjadi 3 (tiga) unit topografi yakni: Daerah dataran rendah (ketinggian 0 sampai 600 meter dari permukaan laut); Daerah berbukit (ketinggian 600 sampai 1.000 meter dari permukaan laut); dan Daerah pegunungan (Daerah ketinggian 1.000 sampai dengan 2.000 meter dari permukaan laut).

Keadaan wilayah sepanjang Pantai Pesisir Barat umumnya datar sampai berombak dengan kemiringan berkisar 3% sampai 5%. Di bagian Barat Laut Kabupaten Pesisir Barat terdapat gunung-gunung dan bukit, yaitu Gunung Pugung (1.964 m), Gunung Sebayon (1.744 m), Gunung Telalawan (1.753 m) dan Gunung Tampak Tunggak (1.744 m).

Pesisir Barat merupakan hasil pemekaran Kabupaten Lampung Barat, yang disahkan pada tanggal 25 Oktober 2012. Wilayah Kabupaten Pesisir Barat secara administratif terdiri dari 11 Kecamatan dengan 116 desa (di Pesisir Barat disebut Pekon) dan 2 Kelurahan, dengan jumlah penduduk sebesar  $\pm$  136.370 jiwa.

Dilihat dari luas wilayah kecamatan Bengkunt Belimbing merupakan kecamatan terluas di kabupaten Pesisir Barat dengan luas wilayah 97.122 ha atau 32,69 % dari luas total Kabupaten Pesisir Barat. Sedangkan untuk luas wilayah kecamatan terkecil adalah kecamatan Krui Selatan dengan luas wilayah 3.625 Ha atau 1,26% dari luas total wilayah Kabupaten Pesisir Barat.

Lebih jelasnya untuk mengetahui kecamatan-kecamatan dan jumlah kelurahan/pekon yang ada di Kabupaten Pesisir Barat dapat dilihat tabel berikut ini:

**TABEL 1**

Daftar Nama Kecamatan dan Luas Wilayah Kabupaten Pesisir Barat

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/ Desa		Luas Wilayah Administrasi	
		Kelurahan	Desa/ Pekon	(Km)	(%)thd Total
1.	Bengkunat Belimbing	-	12	943,70	33,59
2.	Bengkunat	-	8	215,03	7,45
3.	Ngambur	-	9	327,17	11,33
4.	Pesisir Selatan	-	13	409,17	14,17
5.	Krui Selatan	-	9	36,25	1,26
6.	Pesisir Tengah	2	5	120,64	4,18
7.	Way Krui	-	9	40,92	1,42
8.	Karya Penggawa	-	11	211,11	7,26
9.	Pesisir Utara	-	10	84,27	2,92
10.	Lemong	-	13	454,97	15,65
11.	Pulau Pisang	-	6	64,00	2,20
<b>Jumlah Total</b>		<b>2</b>	<b>105</b>	<b>2.907,23</b>	<b>100</b>

Sumber: Dokumentasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat 2019.

### 3. Keadaan Penduduk Kabupaten Pesisir Barat.

Kabupaten Pesisir Barat memiliki jumlah penduduk + 157.594 jiwa dengan kepadatan rata-rata penduduk + 54,20 jiwa/km<sup>2</sup>. Data secara umum terdiri dari penduduk laki-laki dan penduduk perempuan yang tersebar di 11 Kecamatan, data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

**TABEL 2**

Jumlah Penduduk per Kecamatan di Pesisir Barat.

No.	Nama	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jumlah	Kepadatan
1.	Bengkunat	94,370	24,003	52,449
2.	Bengkunat	6,640	11,318	11,078
3.	Ngambur	278,68	19,075	568
4.	Pesisir Selatan	40,917	23,494	1,035
5.	Krui Selatan	3,625	10,584	3,625
6.	Pesisir Tengah	118,58	18,425	2,084

7.	Way Krui	4,092	9,546	2,314
8.	Karya Penggawa	9,989	15,374	14,072
9.	Pesisir Utara	11,212	8,772	1,280
10.	Lemong	45,499	13,502	28
11.	Pulau Pisang	4,361	1,965	257
Total		376,12	156,158	88,790

Sumber: Dokumentasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat 2019.

#### 4. Sosial dan Budaya di Kabupaten Pesisir Barat.

Untuk kondisi pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan data dari Pesisir Barat Dalam Angka tahun 2016, jumlah Sekolah Dasar (SD) terdapat 109 buah yang tersebar di seluruh Kecamatan. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) berjumlah 31 buah, Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 13 buah. Sedangkan untuk sekolah keagamaan Madrasah Ibtidaiyah (MI) berjumlah 26 buah dan Madrasah Aliyah (MA) berjumlah 8 buah, sedangkan untuk Madrasah Ibtidaiyah (MTs) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Kabupaten Pesisir Barat tidak memiliki sekolah tersebut. Lebih jelasnya kondisi Pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**TABEL 3**

Fasilitas Pendidikan Yang Tersedia di Kabupaten Pesisir Barat.

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Sarana Pendidikan				
		SD	SLTP	SMA	MI	MA
1.	Bengkunat	12	5	1	6	1
2.	Bengkunat	5	2	1	6	-
3.	Ngambur	10	4	2	8	1
4.	Pesisir Selatan	17	5	1	6	1
5.	Krui Selatan	8	1	-	-	1
6.	Pesisir Tengah	11	3	5	2	2
7.	Way Krui	5	1	-	-	-

8.	Karya Penggawa	11	1	1	-	1
9.	Pesisir Utara	14	3	1	-	1
10.	Lemong	16	6	1	2	-
11.	Pulau Pisang	2	1	-	-	-

Sumber: Dokumentasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat 2019.

#### 5. Sejarah DPRD Kabupaten Pesisir Barat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam kerangka pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Kabupaten Pesisir Barat adalah Kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat, pada tahun 2012 berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2012, Kabupaten Pesisir Barat terbentuk. Pertengahan 2014 tepatnya pada tanggal 9 April 2014 dilaksanakan pemilihan umum serentak se-Indonesia untuk memilih para anggota dewan legislatif. Saat itu, DPRD Lampung Barat dan DPRD Pesisir Barat masih bergabung, kemudian pada Desember 2014 melalui keputusan Gubernur anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat Resmi berpisah dari Lampung Barat.

Sebagai sebuah daerah otonom yang baru, Kabupaten Pesisir Barat tentunya membutuhkan perangkat-perangkat penyelenggaraan pemerintahan, baik itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif, sebagai sarana penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan publik.

## 6. Fungsi, Tugas-tugas dan Wewenang DPRD.

### a. Fungsi DPRD

DPRD mempunyai fungsi :

1. Legislasi.
2. Anggaran
3. Pengawasan

### b. Tugas dan Wewenang DPRD.

DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

1. Membentuk peraturan daerah bersama Bupati.
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Bupati.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.
4. Mengusulkan pengangkatan atau pemberhentian Bupati dan/atau wakil Bupati kepada menteri dalam negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan atau pemberhentian.
5. Memilih wakil Bupati dalam hal kekosongan jabatan wakil Bupati.
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
10. Mengupayakan terlaksanakannya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 7. Hak DPRD

DPRD mempunyai hak sebagai berikut :

1. Hak interpelasi
  2. Hak Angket
  3. Hak menyajikan pendapat.
- #### 8. Hak anggota DPRD.
1. Mengajukan rancangan peraturan daerah.
  2. Mengajukan pertanyaan.
  3. Menyampaikan usul-usul pendapat.
  4. Memilih dan dipilih.
  5. Membela diri.
  6. Imunitas.
  7. Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas.
  8. Protokoler.
  9. Keuangan dan administrasi<sup>53</sup>.

---

<sup>53</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Dearah, Pasal 105 Ayat

## 9. Keanggotaan masing-masing komisi.

**KOMISI 1**

Nama	Jabatan
Elizawati, S.Sos	Ketua
Ali Yudiem, S.H	Wakil Ketua
Ahmad Husaini, S.Pd.I	Sekretaris
Sri Suryanti, S.E	Anggota
Dr. Asnawi Zain, DT. MH	Anggota
Wahyu Nurbaeti	Anggota
Mega Mustika, A.Md. Kep	Anggota

**KOMISI II**

Nama	Jabatan
Ripzon Efendi	Ketua
April Liswar	Wakil Ketua
Martin Sofian, S.Kom	Sekretaris
Kanadi	Anggota
Dedi Ansori B	Anggota
Supardi Rudianto	Anggota
Saiful Hadi, S.H,i	Anggota
M. Syahrudin	Anggota



### KOMISI III

Nama	Jabatan
Drs. Syamsir	Ketua
Mat Nawawi	Wakil Ketua
Basis Efendi, S.H	Sekretaris
Hi. M. Iqbal, S.Sos	Anggota
Agus cik	Anggota
Dedi Irawan	Anggota
Aris Ikhwanda	Anggota

#### 10. Badan-badan yang terdapat di DPRD.

##### A. Badan Legislasi Daerah

Badan legislasi daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersipat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna. Kedudukan dan keanggotaan badan Legislasi daerah terbentuk pada masa pemulaan keanggotaan DPRD dan pemulaan tahun sidang. Jumlah badan legislasi daerah ditetapkan dalam rapat paripurna menurut pertimbangan dan pemerataan jumlah anggota komisi. Badan Legislasi Daerah dapat diubah setiap tahun anggaran, badan Legislasi daerah bertugas :

1. Menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran dilingkungan DPRD.
2. Kordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara DPRD

(Legislatif) dan pemerintah daerah (eksekutif).

3. Menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan.
4. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD.
5. Memberikan pertimbangan kepada rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi diluar prioritas rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah (prolegda).
6. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui kordinasi dengan komisi dan/atau penitia khusus.
7. Memeberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh badan musyawarah.
8. Membuat laporan kinerja pada masa akhir kenaggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa kenaggotaan berikutnya.

#### B. Badan anggaran DPRD.

Badan anggaran DPRD merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersipat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada masa awal keanggotaan DPRD. Penempatan anggota DPRD dalam badan anggaran dan perpindahannya ke alat kelengkapan

DPPRD lainnya didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran. Badan anggaran mempunyai tugas antara lain:

1. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD paling lambat 5 bulan sebelum ditetapkan APBD.
2. Melakukan konsolidasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara.
3. Memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.
4. Melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama tim anggaran daerah.
5. Melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rencana kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati.
6. Memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja daerah.

#### C. Badan Kehormatan DPRD.

Badan kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. Pembentukan badan kehormatan berdasarkan

keputusan DPRD. Anggota badan kehormatan dipilih dari dan oleh anggota DPRD sebanyak tiga orang. Badan kehormatan dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh sekretariat DPRD. Tugas Badan Kehormatan DPRD :

1. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
2. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib atau kode etik DPRD.
3. Melakukan penyidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, dan /atau masyarakat.
4. Melaporkan keputusan badan kehormatan atau hasil penyelidikan, dan klarifikasi kepada rapat paripurna DPRD. Dalam pelaksanaan penyidikan, verifikasi, dan klarifikasi, badan kehormatan bisa meminta bantuan dari ahli independen.

#### D. Alat kelengkapan lainnya.

Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lainnya berupa panitia khusus, panitia khusus merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap, panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna DPRD atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan badan musyawarah, pembentukan panitia khusus yang ditetapkan dengan keputusan DPRD, jumlah anggota panitia khusus dipertimbangkan dengan jumlah anggota disetiap komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran DPRD. Ketua

dan wakil ketua panitia khusus dipilih oleh anggota panitia khusus, panitia khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat DPRD.

11. Keanggotaan DPRD Kabupaten Pesisir Barat.

**Tabel 4**

Fraksi Partai PDIP

No	Nama	Jabatan	Asal Partai
1.	Kanadi	Ketua	PDI. P
2.	Basis Efendi, S.E	Wakil Ketua	PDI. P
3.	Ripzon Efendi	Sekretaris	PDI. P
4.	Sri Suryanti, S.E	Bendahara	PDI. P
5.	Piddinuri	Anggota	PDI. P

Sumber: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat. Tentang: Penetapan Pimpinan dan Anggota Fraksi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

**Tabel 5**

Fraksi Partai Demokrat

No	Nama	Jabatan	Asal Partai
1.	Drs. Syamsir	Ketua	Demokrat
2.	M. Towil	Wakil Ketua	Demokrat
3.	Mega Mustika, A.Md Kep	Anggota	Demokrat
4.	M. Syahrudin	Anggota	Demokrat
5.	Aris Ikhwanda	Anggota	Demokrat

6.	April Liswar	Anggota	Demokrat
----	--------------	---------	----------

Sumber: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.  
Tentang: Penetapan Pimpinan dan Anggota Fraksi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

**Tabel 6**

Fraksi Gabungan GERINDRA-PKS

No	Nama	Jabatan	Asal Partai
1.	Hi. Muhammad Iqbal, S.Sos	Ketua	Gerindra-Pks
2.	Ahmad Husaini	Wakil Ketua	Gerindra-Pks
3.	Drs. A. E Wardhana Kasuma	Sekretaris	Gerindra-Pks
4.	Martin Sofian, S.Kom	Anggota	Gerindra-Pks

Sumber: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.  
Tentang: Penetapan Pimpinan dan Anggota Fraksi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

**Tabel 7**

Fraksi Pesisir Barat Bersatu

No	Nama	Jabatan	Asal Partai
1.	Dedi Ansori	Ketua	PBB
2.	Ali Yudiem, S.H	Wakil Ketua	PBB
3.	Dr. Asnawi Zain, DT., M.H	Sekretaris	PBB
4.	M. Nawawi	Anggota	PBB

5.	Elizawati, S.Sos	Anggota	PBB
6.	Dedi Irawan	Anggota	PBB
7.	Saiful Hadi, S.Hi	Anggota	PBB
8.	Wahyu Nurbaeti	Anggota	PBB
9.	Supardi Rudianto	Anggota	PBB
10.	Agus Cik	Anggota	PBB

Sumber: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.  
Tentang: Penetapan Pimpinan dan Anggota Fraksi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

## B. Deskripsi Data Penelitian

### 1. Pelaksanaan Hak Inisiatif Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat.

Kemandirian dalam berotonomi bukan berarti daerah bisa membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari undang-undang nasional, karna hakikatnya peraturan perundang-undang daerah harus tetap dalam acuan perundang-undangan nasional atau perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya.

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016.

No	Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat
1	Perda Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung.
2	Perda Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
3	Perda Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
4	Perda Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan



	Penanggulangan Bencana.
5	Perda Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
6	Perda Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT Bank Lampung.
7	Perda Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Peratin
8	Perda Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Lembaga Daerah
9	Perda Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Pasar.
10	Perda Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.
11	Perda Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Laporan Pertanggung Jawaban.
12	Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang APBD- Perubahan Tahun 2016.
13	Perda Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
14	Perda Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
15	Perda Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Pekon.
16	Perda Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Keuangan Pekon.

17	Perda Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah.
18	Perda Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Jasa Umum (Retribusi).
19	Perda Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Jasa Usaha (Retribusi).
20	Perda Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perijinan Tertentu.
21	Perda Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
22	Dalam proses evaluasi provinsi Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Barat.
23	Dalam proses evaluasi provinsi Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata.
24	Dalam proses Evaluasi Provinsi Tentang Perlindungan Masyarakat Adat Sai Batin.

Perda yang dihasilkan pada Tahun 2017.

No	Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
1	Perda Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pelestarian Adat Sai Batin.
2	Perda Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
3	Perda Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan

	Pariwisata Daerah.
4	Perda Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Perubahan Nama Kecamatan Bangkumat Belimbing Menjadi Kecamatan Bangkumat Dan Kecamatan Bangkumat Menjadi Kecamatan Ngaras.
5	Perda Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat.
6	Perda Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah.
7	Perda Nomor 07 Tahun 2017 Tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017.
8	Perda Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Barat.
9	Perda Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Larangan Prostitusi.
10	Perda Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik.
11	Perda Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
12	Perda Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Perikanan Daerah.
13	Perda Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
14	Perda Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum dan

	Ketentraman Masyarakat.
15	Perda Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Produk Hukum Daerah.
16	Perda Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penataan Pemerintah Pekon.
17	Perda Nomor 17 Tahun 2017 Tentang APBD Tahun Anggaran 2018.

Perda yang dihasilkan pada Tahun 2018:

No	Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
1	Perda Tentang Ketertiban Wisata.
2	Perda Tentang Perlindungan Bahasa Daerah.
3	Perda Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Pada PT bank Lampung.
4	Perda Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.
5	Perda Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Pesisir Barat 2018-2037.
6	Perda Tentang Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 2018-2037.
7	Perda Tentang Perubahan Pertama Tentang Pemilihan Peratin.

Perda yang dihasilkan pada Tahun 2019:

No	Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat
1	Perda Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Pesisir Barat Pt. Krui Sukses Mandiri.

2	Perda Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Peneyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Ke Dalam Modal Saham Pt. Krui Sukses Mandiri.
3	Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4	Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
5	Perda Tentang Penyelenggaraan Pelayan Publik.
6	Perda Tentang Pelayanan Konsultasi Publik
7	Perda Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Dari uraian di atas dapat kita ketahui bahwa telah ada lima puluh lima (55) perda yang berhasil ditetapkan diantaranya lima puluh satu (51) hasil usulan eksekutif dan badan-badan lain dan yang ke empat (4) lainnya berasal dari hak usul inisiatif anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat, diatannya adalah:

1. Perda tentang penambahan penyertaan modal pemerintah pada PT.  
Bank Lampung
2. Perda tentang penyertaan modal pemerintah Kabupaten Pesisir Barat  
kedalam modal saham Pt. Krui Sukses Mandiri
3. Perda tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota  
DPRD Kabupaten Pesisir Barat
4. Perda tentang bantuan keuangan partai politik.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat bapak Piddinuri sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat mengatakan bahwa:

Ya mengetahui, tugas DPRD itu terdiri dari tiga dan fungsi juga terdiri dari tiga. Yang mana tugas dan fungsi ini berkaitan, yang pertama, tugas dari DPRD itu sendiri melakukan pengawasan yang artinya pengawasan ini melakukan kontrol dalam peraturan-peraturan, pelaksanaan perda dan lainnya. Dan yang kedua legislasi, yang artinya dari legislasi ini melakukan pembentukan peraturan daerah (Perda). Dan yang ketiga, itu perencanaan anggaran yang artinya DPRD mempunyai kewenangan dalam hal anggaran daerah atau APBD. Sedangkan fungsi, seperti yang tadi saya jelaskan yaitu melakukan kontrol terhadap perda dan lainnya, legislasi itu pembentukan perda, perencanaan anggaran kewenangan dalam APBD.

Terkait tugas dan fungsi disini pernyataan bapak Piddinuri selaku anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat sekaligus ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat, bahwasanya beliau memahami atau mengetahui dari tugas dan fungsi DPRD itu sendiri. Dalam wawancara saya selanjutnya beliau mengatakan bahwa:

Dalam proses pembentukan perda itu melwati proses diataranya:

- (a) Perencanaan
- (b) Penyusunan
- (c) Pembahasan
- (d) Penetapan
- (e) Pengundangan
- (f) Penyebarluasan.

Tentunya disetiap melakukan pembentukan Perda DPRD harus melawati tahap-tahap seperti apa yang disampaikan oleh bapak Piddinuri selaku anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat sekaligus Ketua DPRD Kabupaten pesisir barat agar tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan juga agar tidak menimbulkan pro kontra terhadap Perda yang disahkan. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa:

Kira-kira waktu yang dibutuhkan itu kurang lebih tiga (3) bulanan, dari perencanaan sampai ke penyebarluasan ditetapkan suatu Perda.

Seperti yang kita ketahui bahwa dalam pembentukan suatu Perda sampai ke penetapan itu memang memerlukan waktu yang bisa dikategorikan tidak singkat, karna dalam pembentukan Perda itu sendiri melewati tahap-tahap yang memang harus matang guna menghindari pro kontra dan tidak keluar dari jalur yang ditetapkan undang-undang khususnya. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa:

-ya terkadang paling hambatan dari masyarakat yang ada segelintir yang tidak setuju tetapi setelah ditetapkan dan sudah berjalannya Perda.  
-dan untuk mengatasi kita pihak DPRD hanya bisa lebih meyakinkan kalau perda itu layak

Dalam pembentukan Perda memang harus benar-benar diperhatikan guna menghindari pro kontra seperti yang dijelaskan oleh bapak piddinuri itu sendiri.

Oleh karenanya seharusnya dalam pembentukan Perda itu sendiri harus dari cikal bakal masyarakat itu sendiri guna menghindari konflik-konflik yang tidak diinginkan. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa:

Ya, peran masyarakat disini menyampaikan ide atau gagasan untuk suatu perda seperti contohnya Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok, itu kan asalnya dari ide masyarakat yang alhamdulillah bisa kita perjuangkan di jalur politik sehingga ide tersebut ditetapkan sebagai Perda.

Oleh karena cikal bakal rancangan perda berasal dari pikiran jernih masyarakat setempat sehingga wakil rakyat di perlemen pun tidak terlalu mengalami kendala dalam proses pengusulan sampai ke pembahasan sehingga menjadi produk legislasi daerah. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa:

-Melakukan sosialisasi kemasyarakat  
-memasang belihon bahwa telah ditetapkannya suatu perda<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup>Piddinuri, wawancara dengan penulis, Kantor DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Krui, 15 Agustus 2019.



Memang sudah seharusnya setelah ditetapkan suatu perda pihak pemerintah daerah mengumumkan atau memberi tahu dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat bahwa telah ditetapkan perda agar masyarakat tahu peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah tersebut.

Wawancara yang kedua kepada bapak Mega Mustika, A.Md Kep. Selaku anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat, beliau mengatakan:

Ya, tugas DPRD itu ialah melakukan Pengawasan, Pembentukan Perda, Anggaran. Sedangkan fungsi melakukan kontroling terhadap peraturan-peraturan, merancang Perda, Anggaran daerah APBD

Terkait tugas dan fungsi disini pernyataan bapak Mega Mustika selaku anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat, bahwasanya beliau cukup memahami atau mengetahui dari tugas dan fungsi DPRD itu sendiri. Dalam wawancara saya selanjutnya beliau mengatakan :

Dalam proses melewati:

- (a) perencanaan
- (b) Pembahasan
- (c) Penetapan

Tentunya disetiap melakukan pembentukan Perda DPRD harus melewati tahap-tahap seperti apa yang disampaikan oleh bapak Mega Mustika selaku anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat agar tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan juga agar tidak menimbulkan pro kontra terhadap Perda yang disahkan. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa:

Tergantung Perdanya, biasanya kalo tidak salah kurang lebih lima bulanan mungkin.

Seperti yang kita ketahui bahwa dalam pembentukan suatu Perda sampai ke penetapan itu memang memerlukan waktu yang bisa dikategorikan tidak singkat,

karna dalam pembentukan Perda itu sendiri melewati tahap-tahap yang memang harus matang guna menghindari pro kontra dan tidak keluar dari jalur yang ditetapkan undang-undang khususnya. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa: selanjutnya beliau mengatakan bahwa:

dari masyarakat yang ada segelintir yang tidak setuju tetapi setelah ditetapkan dan sudah berjalannya Perda.

Dalam pembentukan Perda memang harus benar-benar diperhatikan guna menghindari pro kontra seperti yang dijelaskan oleh bapak mega mustika itu sendiri. Selanjutnya beliau mengatakan.

-Perannya menyampaikan gagasan.

Oleh karenanya seharusnya dalam pembentukan Perda itu sendiri harus dari cikal bakal masyarakat itu sendiri guna menghindari konflik-konflik yang tidak diinginkan. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa:

Memasang Belihon didepan kantor<sup>55</sup>

Memang sudah seharusnya setelah ditetapkannya suatu perda pihak pemerintah daerah mengumumkan atau memberi tahu dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat bahwa telah ditetapkannya perda agar masyarakat tahu peraturan perundang-undangan yang berlaku didaerah tersebut.

Wawancara saya yang keempat kepada bapak Agus Cik selaku Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat, beliau mengatakan:

tugas DPRD itu ialah melakukan Pengawasan, Pembentukan Perda, Anggaran. Sedangkan fungsi melakukan kontroling terhadap peraturan-peraturan, merancang Perda, Anggaran daerah APBD.

---

<sup>55</sup> Mega Mustika, wawancara dengan penulis, Kantor DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Krui, 15 Agustus 2019.

Terkait tugas dan fungsi disini pernyataan bapak Mega Mustika selaku anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat, bahwasanya beliau cukup memahami atau mengetahui dari tugas dan fungsi DPRD itu sendiri. Dalam wawancara saya selanjutnya beliau mengatakan :

Melakukan perencanaan sampai kepenetapan.

Sejauh ini, berapa lama waktu yang diperlukan oleh anggota DPRD dalam proses penyusunan sampai kepada pengesahan perda selanjutnya beliau mengatakan:

-Kurang lebih 3 bulanan sampai pada penetapan dalam pelaksanaan peraturan daerah adakah hambatan yang dihadapi beliau mengatakan:

Hambatannya dampak dari perda yang ditetapkan banyak dari masyarakat protes.

berperan dalam proses pembuatan/penyusunan Perda beliau mengatakan bahwa:

Penempatan masyarakat paling di perencanaan karna menyampaikan ide atau gagasan mereka.

Apa upaya yang dilakukan agar masyarakat mengetahui beliau mengatakan bahwa:

-melakukan sosialisasi<sup>56</sup>.

Wawancara keempat kepada bapak April liswar, S.E selaku Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat, mengatak bahwa:

tugas DPRD itu ialah melakukan Pengawasan, Pembentukan Perda, Anggaran. Sedangkan fungsi melakukan kontroling terhadap peraturan-peraturan, merancang Perda, Anggarn daerah APBD

---

<sup>56</sup>Agus Cik, wawncara dengan penulis, Kantor DPRD Kabupaten pesisir Barat, Krui, 15 Agustus 2019.

Bagaimanakah proses/mekanisme pembentukan Perda Kabupaten Pesisir Barat beliau mengatakan:

-Melakukan perencanaan sampai kepenetapan.

lama waktu yang diperlukan dalam proses penyusunan sampai kepada pengesahan perda kabupaten pesisir barat beliau menyampaikan bahwa:

-Kurang lebih 3 bulanan sampai pada penetapan.

hambatan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan peraturan daerah, beliau mengatakan:

Hambatannya dampak dari perda yang ditetapkan banyak dari masyarakat protes.

Apakah masyarakat ikut berperan dalam proses pembuatan/penyusunan Perda beliau mengatakan bahwa:?

Penempatan masyarakat paling di perencanaan karna menyampaikan ide atau gagasan mereka.

masyarakat mengetahui bahwa telah ditetapkannya suatu Perda beliau mengatakan bahwa:

-melakukan sosialisasi<sup>57</sup>

Wawancara saya yang kelima kepada bapak Ali Yudiem, S.H selaku anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat mengatakan bahwa:

tugas DPRD itu ialah melakukan Pengawasan, Pembentukan Perda, Anggaran. Sedangkan fungsi melakukan kontroling terhadap peraturan-peraturan, merancang Perda, Anggaran daerah APBD

mekanisme pembentukan Perda Kabupaten Pesisir Barat beliau mengatakan bahwa:

---

<sup>57</sup>April Liswar, wawancara dengan penulis, Kantor DPPRD Kabupaten Pesisir Barat, Krui, 15 Agustus 2019.

Melakukan perencanaan sampai kepenetapan.

lama waktu yang diperlukan oleh anggota beliau menyatakan bahwa:

Kurang lebih 3 bulanan sampai pada penetapan.

hambatan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan peraturan daerah beliau mengatakan bahwa:

Hambatannya dampak dari perda yang ditetapkan banyak dari masyarakat protes.

partisipasi masyarakat tersebut beliau mengatakan bahwa;

Penempatan masyarakat paling di perencanaan karna menyampaikan ide atau gagasan mereka.

agar masyarakat mengetahui bahwa telah ditetapkannya suatu Perda beliau menyampaikan bahwa:

- melakukan sosialisasi
- memasang belihoko<sup>58</sup>.

Dari hasil wawancara saya kepada ke lima Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat yaitu kepada Piddinuri selaku ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Mega Mustika, A.Md Kep , Agus Cik, April Liswar, S.E, Ali yudiem, S.H jawaban dari kelima anggota dewan yang diwawancarai dapat disimpulkan dalam pelaksanaan perda Kabupaten Pesisir Barat bisa dikatakan belum berjalan dengan optimal, yang pertama memang ada yang berasal dari aspirasi masyarakat yang berhasil diperjuangkan melalui garis politik, menjadi produk hukum daerah Kabupaten Pesisir Barat. Contohnya dari

---

<sup>58</sup>Ali Yudiem, wawancara dengan penulis, Kantor DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Krui, 151 Agustus 2019.

tujuh peraturan daerah yang telah diterangkan di atas salah satunya yang berasal dari aspirasi masyarakat ialah Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Oleh karena cikalbakal rancangan perda berasal dari pikiran jernih masyarakat setempat sehingga wakil rakyat di perlemen pun tidak terlalu mengalami kendala yang berarti dalam proses pengusulan sehingga dalam proses pembahasan perda tersebut sehingga menjadi produk hukum daerah.

## 2. Faktor Penghambat

### A. Faktor Internal

#### 1) Faktor Kapasitas Wakil Rakyat.

Hal ini terkait dengan kapasitas anggota dewan yang dimaksud dimana dari ke dua puluh lima (25) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat, minimnya kemampuan legal drafting anggota DPRD menjadi penghambat dalam pemanfaatan hak inisiatif-nya.

Banyak persoalan yang membelit kehidupan masyarakat, yang sebenarnya DPRD Kabupaten Pesisir Barat mampu untuk menyelesaikan terhadap kebutuhan masyarakat berkaitan dengan bidang hukum, dengan melahirkan perda sebagai regulasi yang dapat digunakan masyarakat dalam keberlangsungan kehidupan bernegara, namun lagi-lagi keterbatasan, kecermatan dan kepiawaian dalam membentuk produk legislasi menjadi faktor kendala.

Dalam forum-forum penggalian aspirasi dimasyarakat pun, tidak jarang proses yang dilakukan DPRD Kabupaten Pesisir Barat cenderung sangat tertutup. Dengan indikasi selalu yang dilibatkan ialah konsituen masing-masing anggota DPRD, sehingga anggota DPRD secara individu maupun lembaga, mengalami

krisis refrensi informasi persoalan yang dialami masyarakat, seharusnya wakil rakyat langsung berdialog dengan masyarakat tanpa membedakan konstituen-nya atau bukan.

## 2) Faktor Latar Belakang Keilmuan

Selain faktor kapasitas, faktor latar belakang keilmuan menjadi catatan tersendiri dalam melihat kendala DPRD Kabupaten Pesisir Barat dalam menggunakan hak inisiatifnya. Dari dua puluh lima (25) anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat periode 2014-2019 yang berlatar belakang pendidikan ilmu hukum hanya dua (2) orang, yang satu berlatar belakang Sarjana Hukum Islam (Saiful Hadi, S.Hi) Fraksi Pesisir Barat Bersatu dan (Ali Yudiem, S.H) Fraksi Pesisir Barat Bersatu. Dan yang ke dua puluh tiga (23) orang lainnya berlatar belakang non hukum.

## B. Faktor Eksternal

Kurangnya komunikasi politik antara DPRD dengan masyarakat salah satu kendala dalam pelaksanaan hak inisiatif. Dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD tidak lagi bagian dari pemerintah daerah tetapi sebagai mitra kerja bagi pemerintah daerah. Disamping itu juga berfungsi sebagai wakil rakyat, karena dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Miriam Budiardjo, berpendapat bahwa : “Bagi anggota badan legislatif terbuka kesempatan untuk bertindak sebagai pembawa suara rakyat dan mengajukan perasaan-perasaan dan pandangan-pandangan yang berkembang secara dinamis



dalam masyarakat damai. Dengan demikian gap antara yang memerintah dan yang diperintah dapat diperkecil”<sup>59</sup>



---

<sup>59</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 56.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PENELITIAN**

#### **A. Pelaksanaan Hak Inisiatif Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.**

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 menyatakan bahwa DPRD bersama Gubernur/Bupati/Wali Kota membentuk atau menetapkan Perda. Hal ini bertujuan untuk terjalinnya komunikasi yang efektif demi menetapkan Perda yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

DPRD berfungsi sebagai badan legislatif, dan pemerintah daerah sebagai badan eksekutif. Dalam hal ini DPRD sebagai badan legislatif daerah mempunyai kedudukan yang sederajat dan menjadi mitra pemerintah daerah. DPRD bukan lagi bagian dari Pemerintah Daerah. Sebelumnya berdasarkan undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, DPRD ditetapkan sebagai bagian dari pemerintah daerah, akibatnya DPRD tidak dapat menjalankan tugas sebagai instrumen demokratik sebagai mana mestinya.

Terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi di daerah, seperti kita ketahui bahwa fungsi legislasi adalah salah satu fungsi terhadap legislatif di daerah, fungsi legislatif diamanatkan Undang-undang untuk dijalankan seoptimal mungkin oleh DPRD. Sehubungan dengan hal tersebut, dari hasil penelitian yang dilakukan sejak tahun 2016-2019 DPRD Kabupaten Pesisir Barat telah menetapkan lima puluh lima (55) perda diantaranya lima puluh satu (51) hasil usulan eksekutif dan badan lainnya

empat (4) lainnya berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat. (4) Perda yang dihasilkan DPRD Kabupaten Pesisir Barat selama kurun waktu 2016-2019, yaitu Perda Tentang Perlindungan Masyarakat Sai Batin, Perda Tentang Larangan Prostitusi, Perda Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik, Perda Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat. Jadi dapat disimpulkan bahwa DPRD Kabupaten Pesisir Barat belum secara optimal menggunakan hak inisiatifnya dalam membentuk produk hukum di daerah.

Pada Pasal 45 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 dinyatakan bahwa setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menepatkannya dalam:

- a. Lembaran Negara Republik Indonesia
- b. Berita Negara Republik Indonesia
- c. Lembaran Daerah
- d. Berita Daerah.

Untuk mengundangkan Peraturan perundang-undangan ditingkat daerah diatur dalam pasal 29 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 sebagai berikut:

- a. Peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam lembaran daerah adalah peraturan daerah.
- b. Peraturan Gubernur, Bupati/Wali Kota, atau Peraturan lainnya dibawahnya harus dimuat dalam berita daerah.

- c. Pengundangan Peraturan Daerah dalam lembaran daerah dan berita daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah

Dari deskripsi diatas dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu 2016-2019 DPRD Kabupaten Pesisir Barat belum secara optimal menggunakan hak inisiatifnya baik dalam membentuk maupun kepelaksanaan produk hukum di daerah.

B. Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Hak Inisiatif Anggota DPRD menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

DPRD adalah suatu lembaga permusyawaratan rakyat yang dibentuk dari peraturan perundang-undangan tentang kelembagaan negara yang memiliki suatu tugas penting dalam menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat yang diamanatkan oleh rakyat dipemerintahan, guna menciptakan suatu kemaslahatan umat.

Dalam negara Islam, terdapat seperangkat prinsip yang dapat dijadikan sebagai pedoman dasar bagi pengaturan tingkah laku manusia dalam kehidupan dan pergaulan sesamanya, dalam negara islam prinsip tersebut adalah prinsip Tauhid, Sunnatullah, dan persamaan sesama manusia, dan juga terdapat prinsip persaudaraan dan kebebasan sesama yang menjadi prinsip pemerintahan islam. Pedoman dasar tersebut juga yang menjadi landasan perumusan prinsip-prinsip DPRD dalam melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat.

DPRD itu sendiri dalam Islam disebut *Ahl Al- Hall Wa Al- Aqd* yang mereka telah dipercaya oleh rakyat dengan keilmuan kecendikiawan mereka serta keikhlasan mereka, juga dengan kesederhanaan mereka dalam membuat hukum-hukum yang

diperlukan. Posisi *Ahl Al- Hall Wa Al- Aqd* sendiri dalam pemerintahan yaitu wakil rakyat yang memiliki kekuasaan secara umum, kekuasaan DPRD dalam hal ini *Ahl Al- Hall Wa Al- Aqd* sebagai lembaga pembuat peraturan sekaligus pengontrol harus menjalankan tugasnya sebaik mungkin.

Tugas dan wewenang lembaga perwakilan rakyat dalam Islam secara umum *Ahl Al- Hall Wa Al- Aqd* adalah ahlul ikhtiar dan mereka juga ialah Dewan Perwakilan Rakyat, tugas-tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan juga melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja tetapi tugas mereka mencakup pembentukan maupun pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran. Tugas *Ahl Al- Hall Wa Al- Aqd* adalah mencalonkan dan memilih serta melantik calon khalifah dan memberikan baiat in'iqad kepada khalifah.

Selain itu *Ahl Al- Hall Wa Al- Aqd* juga harus melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Disinalah perlu al-Sulthah al-Tasyriah tersebut diisi oleh para mujtahid dan para ahli fatwa, mereka berusaha mencari ilat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dalam dan menyesuaikannya dengan ketentuan yang terdapat didalam nash. Disamping itu harus ijtihad anggota legislatif atau *Ahl Al- Hall Wa Al- Aqd* harus mengacu pada prinsip *jalb al-masyalihdandaf al-malfasid* (mengambil maslahat membuang kemudharatan) ijtihad mereka perlu

mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.

Dari uraian di atas dapat diketahui Islam mengatur dan menentukan segala kepentingan umat dalam segala bentuk-bentuk peraturan sistem pemerintahan suatu Negara dengan membentuk *Ahl Al- Hall Wa Al- Aqd* atau yang diketahui saat ini yaitu DPRD, dan Islam memberikan gambaran bahwa apapun bentuk corak pemerintahan suatu negara hanya mempunyai satu tujuan yaitu mencapai kemaslahatan umat/masyarakat. Dalam siyasah Islam, tujuan utama dari pembentukan DPRD adalah memperhatikan dan mengurus persoalan-persoalan duniawi, misalnya dalam membentuk Rancangan Peraturan Daerah lalu diperjuangkan dalam jalur politik sehingga ditetapkan Perda yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang tidak lain bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat/masyarakat. Persoalan-persoalan duniawi tersebut mempunyai suatu muara yaitu pemerintahannya harus mampu membawa masyarakatnya untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki untuk akhirat kelak.

Pelaksanaan hak usul inisiatif anggota DPRD dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Pesisir Barat, berdasarkan penelitian yang didapati bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat belum berjalan dengan baik hal ini dilihat dari banyaknya keluhan dari masyarakat, latar belakang keilmuan anggota DPRD dan kapasitas anggota DPRD. Ini berarti bahwa dalam pembentukan Raperda yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pesisir Barat belum berjalan diatas prinsip kemashlahatan umat seperti pengertian konsep fiqh siyasah.

Di antara tugas dan kewajiban DPRD Kabupaten Pesisir Barat juga harus menjamin keamanan dan ketertiban bagi masyarakat dalam menjalankan segala aspek kehidupan. Dan juga dapat menyelesaikan atau bahkan dapat mencegah terjadinya perselisihan ditengah-tengah masyarakat. Karena itulah salah satu tugas DPRD dalam konsep *fiqh siyasah*.

Dalam menjalankan tugasnya DPRD Kabupaten Pesisir Barat harus berdasarkan prinsip-prinsip ketuhanan dalam menentukan suatu kebijakan, dan berdasarkan konsep kabajikan dalam bermusyawarah, dan mengembalikan kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasulnya (sunnahnya) jika, menemukan perbedaan di antara anggota dalam kebajikannya, dengan adanya unsur-unsur dan sifat-sifat tersebut maka dalam melaksanakan perintahnya dapat dijadikan contoh dan panutan oleh masyarakat. Firman Allah dalam. (QS. An-nisa' (4): 59)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar berlainan kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. An-nisa' (4): 59)



Selain itu juga DPRD dalam menjalankan tugasnya juga harus mempunyai kekuatan dalam menyampaikan pendapat demi kebenaran guna kepentingan membela yang lemah, kemudian berlaku adil terhadap masyarakat, serta kewajiban untuk menegakkan yang hak dan menghancurkan yang bathil, serta istiqomah daalm menjalankan perintah Allah jika prinsip itu dipegang teguh oleh DPRD sungguh ini akan berdampak baik bagi semua.

Dalam firman Allah mengatakan; (QS. Al- Imran (3): 104).

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”. (QS. Al-Imran (3): 104).

Dari ayat-ayat diatas dapat kita pahami bahwasanya DPRD atau *Ahl Al- Hall Wa Al- Aqd* dalam melaksanakan tugasnya haruslah berpedoman pada dasar atau prinsip-prinsip keadilan dalam mewakili umat didalam pemerintahan guna membangun kemaslahatan umat.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dan dengan mewawancarai langsung Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat dapat dikatakan bahwa belum sepenuhnya berjalan secara optimal dikarenakan anggota DPRD masih banyak yang tidak memahami hakikat hak inisiatif itu sendiri.
2. Pembentukan Perda di Kabupaten Pesisir Barat belum signifikan karena DPRD belum memenuhi akuntabilitas dan manfaat yang jelas bagi masyarakat. Ini berarti dalam pelaksanaan Perda itu sendiri di Kabupaten Pesisir Barat belum berjalan di atas prinsip yang diamanatkan Undang-undang terlebih lagi dalam *Fiqh Siyasah* bisa dikatakan masih jauh dari prinsip-prinsip kemaslahatan umat seperti pengertian konsep *Fiqh Siyasah*.

## B. Rekomendasi

Dari hasil analisis bahan hukum dengan memperhatikan sekian teori dan konsep dalam tulisan ini, penulis kemudian merekomendasikan/saran beberapa hal agar dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata sehingga yang terkandung dalam skripsi ini benar-benar dapat memberikan sumbangan peningkatan kesejahteraan masyarakat, saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Upaya peningkatan kualitas wakil rakyat dengan cara mengadakan pendidikan singkat terkait pendidikan legal drafting.
2. Meningkatkan komunikasi politik dengan masyarakat melalui penjaringan aspirasi masyarakat (jaring ASMARA) tidak bisa hanya mengharapkan Reses semata.
3. Kalau boleh setiap anggota DPRD mendirikan rumah aspirasi di setiap desa dari asal DAPIL-Nya masing-masing, sebagai wadah penyerapan dan penjaringan aspirasi yang datang dari masyarakat ditingkat desa.
4. Perlu adanya ahli legal drafting, hal ini diharapkan dapat membantu DPRD secara lembaga dalam meningkatkan kemampuan legislasi-Nya, dalam kaitanya dengan penggunaan Hak inisiatif.
5. Perlu dilakukan penganggaran untuk tenaga ahli legal drafting, dalam Dokumen Satuan Kerja (DASK) DPRD Kabupaten Pesisir Barat dimasa mendatang, tanpa mengurangi atau menggunakan anggaran yang disediakan bagi anggota DPRD selama ini.

6. Perlu adanya penelitian lanjutan terkait dengan pelaksanaan hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat agar dapat mengikuti perkembangan pelaksanaan hak inisiatif lembaga DPRD Kabupaten Pesisir Barat – Provinsi Lampung, dan dapat menjadi alat kontroling yang datang dari publik atau pihak eksternal Lembaga DPRD Kabupaten Pesisir Barat.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anwar, Ahmad, *Prinsip-prinsip Metode Research*, Yogyakarta: Sumbangsih, 1975.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka cipta, 1998.
- Abdul Kholiq, Farid, *Fiqh Politik Islam*, Jakarta: Raja Persada, 2005.
- Abdullah, Taufik, *Tematis Dunia Islam*, Jakarta: Ensiklopedia, 2005.
- Abdullah, Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Dijazuli, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Prenada Media, 2000.
- Hanitijo Soemitro, Romi, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1999.
- Kansil, Cristine, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Manan, Bagir *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: FH UII Press, 2001.
- Mahendra, Yusril Ilham, *Revitalisasi Tugas dan Fungsi Dewan Pasca Perubahan UUD 1945 dan Peresmian Rumah Aspirasi Rakyat*, Makalah ini disampaikan pada Diskusi Panel tentang *Revitalisasi Tugas dan Fungsi Dewan Pasca Perubahan UUD 1945*, yang diselenggarakan oleh Universitas Trisakti, Jakarta, 9 November 2000.
- Modoeng, Supardan, *Teori dan Praktik Penyusunan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, Jakarta: PT. Tinta Mas Indonesia, 2001.
- Nurcholis, Hanif, *Administrasi Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2011.

- Pulungan, Suyuthi J, *Fiqih Siyasah: Ajaran dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Qur'an Surat, An-Nisaa [4]: (59).
- Qur'an Surat An-Nisaa [4]: (83).
- Qur'an Surat Al-Imran [3]: (104).
- QS. An-Nuur : (49)
- Ryaas Rasyid, H Syaukani dan Afan Gaffar, *Otonomi Daerah Dalam Kesatuan*, Jogjakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Riwu Kaho, Josep, *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Rineka cipta, 2002.
- Raharjo, Satjipto, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Bandung: Alumni, 1980.
- Sugono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Serundang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.
- Sitajudin, et. Al. *Perlemen Lokal (DPRD) Peran dan Fungsi Dalam Dinamika Otonomi Daerah*, Malang: Setra Press, 2009.
- Sitajudin, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1997.
- Wiyono, Isworo, *Kewarganegaraan*, Bandung: Rafika Aditama, 2006.
- Yudoyono, Bambang, *Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: Refika Aditama, 2000.
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

## **Jurnal**

- Abd al- Wahhab Khallaf, *al-Siyasah al-Syar'iiyah aw Nizham al-Dawlah al-Islamiah fi Syu'un al-Dusturiah wa al-Kharijiyyah wa al-Maliyyah*, al-Qahirah: Mathaba'ah al-Taqaddum, 1397H/1997M

## **Wawancara**

Cik, Agus, wawancara dengan penulis, Kantor DPRD Kabupaten pesisir Barat, Krui, 15 Agustus 2019.

Frengki, *Sistem Politik dan Ketatanegaraan Islam*, Satuan Acara Perkuliahan syariah UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 22 April 2019.

Liswar, April, wawancara dengan penulis, Kantor DPPRD Kabupaten Pesisir Barat, Krui, 15 Agustus 2019.

Mustika, Mega, wawancara dengan penulis, Kantor DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Krui, 15 Agustus 2019.

Piddinuri, wawancara dengan penulis, Kantor DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Krui, 15 Agustus 2019.

Yudiem, Ali, wawancara dengan penulis, Kantor DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Krui, 15 Agustus 2019.

## **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

## **Sumber On-line.**

“Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. (on-line), tersedia di:  
<http://id.m.wikipedia.org> (2 Juli 2000).

“Hak Untuk Menyuarakan Pendapat”. (on-line), tersedia di:  
<http://hakuntukmenyuarakanpendapat.blogspot.com> ( 10 Juni 2010).

“Kajian Fiqih Siyasah”. (On-line), tersedia di: <https://m.hidayatullah.com> (9 Juli 2001).

“Sejarah Pesisir Barat”. (on-line), tersedia di: <http://pesisirbaratkab.go.id> (22 April 2013).

“Sekretariat Negara Republik Indonesia”. (On-line), tersedia di:  
[www.indonesia.go.id](http://www.indonesia.go.id) (9 Juli 2001).